

**TANGGUH INDEPENDENT ADVISORY PANEL  
(PANEL PENASIHAT INDEPENDEN TANGGUH)**

**LAPORAN TENTANG OPERASI**

**DAN**

**USULAN PENGEMBANGAN**

**UNTUK**

**PROYEK LNG TANGGUH**

**Desember 2015**

## DAFTAR ISI

I. Pendahuluan .....	1
II. Masalah-masalah yang disorot .....	5
III. Rekomendasi .....	14
IV. Berita Terkini Mengenai Politik dan Keamanan.....	17
V. Program Sosial dan Ekonomi untuk Pembangunan Papua.....	30
VI. Penatalaksanaan dan Transparansi Pendapatan.....	44

## AKRONIM DAN ISTILAH-ISTILAH BAHASA INDONESIA

Adat	Kebiasaan, hukum dan sistem penyelesaian perselisihan setempat yang diterapkan di banyak daerah di Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ADB	<i>Asian Development Bank</i> Bank Pembangunan Asia
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
YPTB	YPTB – Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni
BDS	<i>Business Development Service</i> Jasa Pengembangan Bisnis
BIN	Badan Intelijen Negara
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas mitra Pemerintah Indonesia dalam Proyek Tangguh (yang dinyatakan tidak konstitusional lagi dan dibubarkan pada tahun 2012)
BPK	Badan Pengawasan Keuangan
Brimob	Brigade Mobil
CAP	<i>Community Action Plan</i> - Rencana Aksi Masyarakat – pendekatan program dukungan untuk memfasilitasi proyek-proyek pembangunan yang didorong oleh masyarakat pada Desa-desa Yang Terkena Pengaruh Secara Langsung
DAV	<i>Directly Affected Village</i> - Desa yang terkena pengaruh secara langsung sebagaimana ditetapkan sejak awal oleh proyek LNG Tangguh
DG Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EITI	<i>Extractive Industry for Transparency Initiative</i> - Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif
ENR	<i>Energy and Natural Resource</i> Energi dan Sumber Daya Alam

ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
GOI	<i>Government of Indonesia</i> - Pemerintah Indonesia
ICBS	<i>Integrated Community Based Security</i> - Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat
ICITAP	Program Bantuan Pelatihan Investigasi Kejahatan Internasional Departemen Kehakiman Amerika Serikat
IEDP	<i>Indigenous Enterprise Development Program</i> Program Pembangunan Kewirausahaan Pribumi
IPB	Institut Pertanian Bogor
ISP	<i>Integrated Social Program</i> - Program Sosial Terpadu – unit pelaksana di dalam Proyek Tangguh dan program-program pembangunan sosial-ekonomi yang dikelola oleh unit tersebut
JUKLAP	Pedoman Lapangan Bersama untuk Keamanan JUKLAP/PAMBERS 2009 pemutakhiran dan perpanjangan perjanjian JUKLAP
Kabupaten	Distrik atau kabupaten
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah Papua
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kodam	Komando Daerah Militer
Kodim	Komando Distrik Militer
Kota	Kota
LARAP	<i>Land Acquisition Resettlement Action Plan</i> Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali – rencana aksi Proyek Tangguh yang menguraikan dampak tak sengaja dari pemukiman kembali Proyek
LNG	<i>Liquid Natural Gas</i> - Gas alam cair
MOE	<i>Ministry of Environment</i> - Kementerian Lingkungan
MOF	<i>Ministry of Finance</i> - Kementerian Keuangan

MOU	<i>Memorandum of Understanding</i> - Nota Kesepahaman
MRP	Majelis Rakyat Papua – suatu badan perwakilan yang terdiri dari para pemimpin agama, adat, dan perempuan yang dibentuk oleh Undang-undang Otonomi Khusus
NGO	<i>Non-Government Organization-</i> Organisasi Non-Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat)
OECD	Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
OPM	Organisasi Papua Merdeka – sebuah organisasi separatis
Otsus	Otonomi Khusus
Pangdam	Panglima Komando Daerah Militer
Perdasus DBH	Peraturan Otonomi Khusus yang dibuat oleh DPRD dan disetujui oleh MRP untuk mengalokasikan hasil minyak dan gas (DBH)
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Polsek	Polisi Sektor
Proper	Program audit nasional Kementerian Lingkungan
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAV	<i>Resettlement Affected Village</i> Desa Yang Terkena Pengaruh Pemukiman Kembali sebagaimana ditetapkan sejak awal oleh Proyek Tangguh -Tanah Merah Baru, Saengga, dan Onar
SBY	Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
SKJ	Izin perjalanan yang diwajibkan yang membatasi akses ke Papua
SKKMIGAS	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mitra Pemerintah Indonesia dalam Proyek Tangguh (yang menggantikan BPMIGAS)
SOP	<i>Standard Operational Procedure</i> Prosedur Operasi Standar
THCU	<i>Tangguh Health Care Unit</i> Unit Perawatan Kesehatan Tangguh

TIAP	<i>Tangguh Independent Advisory Panel</i> Panel Penasihat Independen Tangguh
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TSDP	<i>Tangguh Sustainable Development Program</i> Program Pembangunan Berkelanjutan Tangguh – Program sosial Tangguh yang akan menggantikan ISP sebelumnya di bawah AMDAL baru yang mengatur pengembangan Tangguh
UGM	Universitas Gadjah Mada
UNIPA	Universitas Negeri Papua di Manokwari
UNCEN	Universitas Negeri Cenderawasih di Jayapura
UP4B	Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat
VAT	Pajak Pertambahan Nilai
YSA	Yayasan Sosial Augustinus – sebuah yayasan daerah

## I. Pendahuluan

Panel Penasihat Independen Tangguh (Tangguh Independent Advisory Panel/ “TIAP” atau “Panel”) memberikan nasihat eksternal mengenai aspek non-komersial dari Proyek LNG Tangguh (“Proyek”). Panel ini secara khusus memberikan nasihat kepada BP tentang bagaimana Tangguh dapat mencapai potensinya sebagai model pembangunan kelas dunia. Saat ini Panel diketuai oleh mantan Senator A.S Tom Daschle, yang pernah bertindak sebagai Pemimpin Mayoritas dari Senat A.S, dan Augustinus Rumansara, orang Papua yang memimpin Panel Peninjauan Kepatuhan Bank Pembangunan Asia (“ADB”) dari tahun 2003 hingga 2008, menjabat sebagai penasihat untuk Pemerintah Papua sejak tahun 2008 sampai 2010 dan saat ini memimpin Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Papua.<sup>1</sup> Panel tersebut menggunakan sebuah penasihat independen dan sekretariat di kantor hukum DLA Piper yang dipimpin oleh Gary Klein dan tambahan dukungan dan nasihat dari Ilia Rodriguez dari Grup Daschle.<sup>2</sup> Panel yang ada saat ini dibentuk tahun 2011 dan telah diperpanjang oleh BP hingga April 2017.

Ini adalah laporan lengkap ketiga dari Panel dan laporan kedua tentang proyek ekspansi yang akan dilakukan, dan laporan ini hadir pada saat yang penting. BP sedang mempertimbangkan suatu pengembangan besar di Tangguh yang akan menambah 50% dari kapasitasnya dan membawa ribuan pekerja baru ke lapangan tersebut. Pengembangan tersebut mencakup train (fasilitas pencairan dan pemurnian gas) ketiga di lapangan LNG, sebuah dermaga tambahan, dua anjungan baru dan 16 sumur baru (selanjutnya disebut “Kilang 3”).<sup>3</sup> Proyek ini sudah ditunda sebagai akibat dari keterlambatan dalam persetujuan peraturan (paling cepat konstruksi akan dimulai tahun 2016); dan ada kemungkinan akan ditunda lagi atau dibatalkan sama sekali sebagai akibat dari kondisi pasar minyak dan gas regional dan dunia. Pada tahun 2014, BP menyelesaikan pernyataan dampak sosial dan lingkungan (“AMDAL”) yang akan mengatur komitmennya selama konstruksi pengembangan ini (pada awalnya dijadwalkan dari tahun 2015 – 2019) dan pengoperasiannya setelah itu. Banyak komitmen baru BP, yang kesemuanya adalah berbasis masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, bergantung pada

---

<sup>1</sup>Untuk tujuan laporan ini, istilah “Papua” merujuk ke daerah yang meliputi provinsi Papua dan Papua Barat. Istilah “Provinsi Papua” merujuk ke provinsi Papua menyusul pemisahannya dengan provinsi Papua Barat. Istilah “Papua Barat” merujuk ke provinsi Papua Barat (sebelumnya disebut Irian Jaya Barat) menyusul pendiriannya pada tahun 2004. Peta Papua dan Papua Barat yang menunjukkan lokasi kunci terkait dengan Tangguh dilampirkan sebagai Lampiran I.

<sup>2</sup> Panel sebelumnya, yang memantau fase konstruksi awal Proyek, diketuai oleh mantan Pemimpin Mayoritas Senat A.S, George Mitchell dan termasuk Lord Hannay dari Chiswick, Duta Besar Sabam Siagian dan Reverend Herman Saud.

<sup>3</sup> Lihat laporan TIAP bulan Mei 2014 halaman 10 untuk keterangan lebih lengkap tentang usulan perluasan.

pembangunan Kilang 3. Namun, ada ekspektasi agar semua program ini dapat segera dilaksanakan apa pun yang akan terjadi dengan Kilang 3.

Selain keterlambatan, jatuhnya harga minyak dan gas dunia memberikan tekanan yang sangat besar pada biaya BP di Tangguh, termasuk biaya-biaya untuk komitmen sosialnya. Dalam situasi demikian, sangatlah penting untuk menjaga agar hubungan yang telah dibangun sekian lama di antara para pemangku kepentingan pada semua tingkatan tidak terganggu dan agar kepercayaan serta kredibilitas yang telah dibangun oleh BP tidak dikorbankan demi tuntutan anggaran jangka pendek. Laporan ini berupaya untuk memberikan pengalaman dan konsultasi TIAP pada masalah ini dan membantu mengarahkan BP dalam melaksanakan komitmennya yang sudah ada. Sebagaimana halnya dengan laporan-laporan TIAP sebelumnya, laporan ini akan diterbitkan, bersama dengan tanggapan BP, dan akan dipresentasikan dan dibicarakan dengan para pihak yang berkepentingan di Jakarta, London dan Washington, D.C.<sup>4</sup>

Selain kegiatan-kegiatan TIAP, Tangguh dipantau oleh Grup Pemberi Pinjaman Tangguh (*Tangguh Lenders Group*) yang diwakili oleh ADB (hingga tahun 2014), Japan Bank for International Cooperation dan Mizuho Corporate Bank, yang telah membentuk suatu panel eksternal yang dikelola oleh para ahli independen yang mengunjungi Tangguh. Tinjauan tahunan mereka dibatasi pada hal-hal menyangkut program keselamatan, lingkungan, pemukiman, dan sosial. Hingga pembiayaan untuk Kilang 3 diatur, belum pasti apakah panel pemberi pinjaman akan memantau hal-hal yang secara khusus terkait dengan konstruksi fasilitas pengembangan. Sebagai pengakuan terhadap pekerjaan Grup Pemberi Pinjaman Tangguh, TIAP berfokus pada hal-hal menyangkut keamanan, hak asasi manusia, tata kelola, manajemen pendapatan, situasi politik dan isu-isu yang lebih luas terkait dengan bagaimana Tangguh memengaruhi masyarakat di Teluk Bintuni dan Papua dan bagaimana persepsi mereka terhadap hal itu. Faktor-faktor ini, lebih luas daripada kepatuhan secara ketat, yang terkait secara langsung dengan apakah BP dapat mencapai tujuannya untuk membuat Tangguh sebagai model untuk pembangunan berkelas dunia.

Pada bulan September 2015, TIAP mengunjungi Papua (Jayapura, Manokwari dan Teluk Bintuni) serta Jakarta. Panel bertemu dengan LSM-LSM nasional, Kementerian, dan pejabat senior lain dari Pemerintah Indonesia (“GOI”), termasuk Menteri Koordinator Keamanan dan

---

<sup>4</sup> Akan tersedia, bersama dengan tanggapan BP, di laman BP. Lihat <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9004751&contentId=7008791>



Politik, Menteri Badan Perencanaan Nasional (“Bappenas”), Kepala SKKMigas, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (“DG Migas”) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”), Deputy Menteri Keuangan dan Deputy Direktur BIN (Badan Intelijen Negara).

TIAP bertemu dengan wakil Gubernur Papua Barat dan anggota DPRD dan MRP (Majelis Rakyat Papua), Bupati Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak, Pangdam Papua, Kapolda Papua, Wakil Kapolres Papua Barat, Kapolres Teluk Bintuni dan Kapolsek Babo, Bupati Babo dan Komandan Distrik Militer setempat. Panel berkonsultasi dengan Rektor Universitas Negeri Papua (“UNIPA”), Wakil Rektor Universitas Negeri Cenderwasih dan LSM-LSM Papua, advokat-advokat hak asasi manusia dan para cendekiawan.

Sementara di Tangguh, TIAP bertemu dengan para pekerja Papua dan personel BP yang menjalankan manajemen, operasi, program-program pembangunan Papua dan keamanan di lapangan LNG. Di Teluk Bintuni, TIAP mengunjungi rumah sakit baru di Bintuni dan puskesmas di Babo, bertemu dengan para direktur dan staf medis. Panel juga berkesempatan mengunjungi produksi garmen yang baru dan bisnis perbaikan AC yang baru-baru ini dimulai di Bintuni sebagai bagian dari Program Pembangunan Kewirausahaan Pribumi (“IEDP”). Panel juga bertemu dengan para mitra pelaksana BP yang mendukung dan mengevaluasi program-program pembangunan ekonomi dan sosial BP. Panel berkesempatan untuk membahas tentang Tangguh dengan para duta besar A.S dan Inggris.<sup>5</sup>

Panel meninjau program dan kegiatan BP sehubungan dengan norma-norma global terkini yang paling dihormati yang menciptakan praktik-praktik terbaik untuk proyek di negara-negara berkembang. Hal ini mencakup Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang sudah lama dibentuk; Organisasi Untuk Pedoman Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (“OECD”) untuk Perusahaan Multinasional; Konvensi Organisasi Buruh Internasional Mengenai Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Asli di Negara-negara Independen; Arahan Operasional Bank Dunia terkait dengan masyarakat pribumi dan Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia AS-Inggris (Prinsip-prinsip Sukarela”). Panel juga berkonsultasi mengenai pedoman global terkini seperti Prinsip-prinsip Pedoman tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (“Prinsip Penuntun”); Standar Kinerja tentang Lingkungan dan Keberlangsungan Sosial IFC; dan Prinsip-prinsip Ekuator (berlaku

---

<sup>5</sup> Lihat Lampiran II untuk daftar lengkap pemangku kepentingan yang berkonsultasi dengan TIAP selama kunjungannya bulan September 2015.

secara langsung hanya untuk lembaga-lembaga keuangan).

Panel tidak mengaudit kepatuhan BP terhadap undang-undang setempat atau Indonesia, namun Panel meninjau kepatuhan BP terhadap kewajiban sosial dan lingkungannya berdasarkan AMDAL. Sekarang hal ini mencakup kewajiban atas AMDAL baru terkait dengan pengembangan Proyek, yang banyak di antaranya tidak bergantung pada pembangunan Kilang 3. Panel diberi akses penuh ke semua informasi yang ia minta dari BP dan benar-benar independen dalam penyelidikan dan temuan-temuannya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi TIAP semata-mata. Panel mengharapkan BP untuk mengeluarkan tanggapan terhadap setiap rekomendasinya dan, sebagaimana dicatat di atas, mengantisipasi untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membicarakan laporan ini dan tanggapan BP.

## **II. Masalah-masalah yang disorot**

Terdapat beberapa bidang di mana BP mempunyai prestasi baik serta dapat diharapkan dan patut dipuji. Ini mencakup profesionalisme dan keseriusan staf BP pada setiap level di Tangguh. TIAP menyaksikan tentang perhatian dan komitmen yang luas terhadap keselamatan, mutu dan detil. Sikap ini kelihatannya diadopsi oleh dan diberikan dari pimpinan senior hingga ke bawah, dan khususnya patut dicatat di antara staf Papua.<sup>6</sup>

Satu-satunya peringatan adalah kelalaian atau kelambatan dalam pemeliharaan internal dan eksternal, khususnya atas gedung-gedung yang tidak terkait dengan non-hidrokarbon, termasuk pusat administrasi dan asrama di lapangan LNG, yang dilihat dan dipakai oleh pengunjung dan karyawan. Hal ini mungkin merupakan tanggung jawab kontraktor, namun BP harus menegakkan standar ketat karena dua alasan penting: pertama, agar semua pengunjung mendapatkan kesan pertama dan mempunyai pengalaman yang berlangsung lama yang mencerminkan mutu dan perhatian atas detil yang diperlihatkan secara reguler oleh karyawan BP dan kedua, agar karyawan BP, yang bekerja bergiliran (*shift*) dalam waktu panjang di lapangan, melihat dan memakai fasilitas yang dipelihara dengan standar di mana setiap karyawan diharapkan untuk menjaga saat mereka melaksanakan fungsi penting mereka masing-masing. Lingkungan fisik dari lapangan dan fasilitas produksi non-hidrokarbonnya harus

---

<sup>6</sup> Memang TIAP hanya berinteraksi dengan sebagian kecil dari seluruh staf, yang mungkin mempunyai perilaku terbaik ketika berinteraksi dengan TIAP. Namun demikian, ini merupakan perwakilan lintas bagian dari semua tingkat.

mencerminkan tingkat pemeliharaan yang tinggi yang dituntut dan diharapkan oleh BP dari semua karyawannya.

Banyak dari program sosial Tangguh berjalan dengan baik, yang terus memberi manfaat bagi para tetangganya. Semua program sosial Tangguh, yang dikenal dengan ISP, pada awalnya difokuskan pada Desa-desa Yang Terkena Pengaruh Secara Langsung (“DAV”) yang paling dekat dengan lapangan LNG. Di antaranya adalah hibah tahunan Rencana Aksi Masyarakat kepada DAV (“CAP”) yang memungkinkan masing-masing DAV untuk memilih prioritasnya sendiri, dan yang sekarang sudah berakhir setelah 10 tahun, jangka waktu yang diwajibkan oleh AMDAL.<sup>7</sup> Program-program ini sekarang mejadi bagian dari Program Pembangunan Berkelanjutan Tangguh (“TSDP”), yang memperluas penerima manfaat kepada semua Masyarakat Asli (“IP”) dari suku asli dari empat suku asli di Teluk Bintuni (dan sekarang kabupaten yang bertetangga, Fakfak). Walaupun terdapat kekhawatiran awal TIAP akan penghapusan CAP, belum ada kekecewaan yang dikemukakan karena perubahan pada fokus dari penduduk DAV.

Manfaat yang paling berhasil bagi masyarakat yang lebih luas yang telah dilakukan oleh BP adalah pemeliharaan kesehatan. Rumah sakit yang baru-baru ini dibangun di Bintuni telah didukung oleh BP dan saat ini menjanjikan sesuatu yang hebat karena secara dramatis meningkatkan akses ke pemeliharaan kesehatan yang berkualitas di daerah ini. Puskesmas-puskesmas di Babo dan Bintuni dan posyandu di desa-desa (sebelumnya Unit-unit Kesehatan Masyarakat Tangguh yang inovatif<sup>8</sup>) semuanya telah menjadi bagian dari pertarungan yang berhasil untuk membasmi malaria dan mengurangi penyakit-penyakit infeksi lainnya. Ini bukan menandakan bahwa perbaikan-perbaikan tersebut sudah cukup. Kurangnya peralatan keselamatan jiwa yang mutlak pada lokasi yang dekat memberikan tantangan besar. Masih banyak yang perlu dilakukan, khususnya untuk mendukung kesehatan ibu dan anak, TB, HIV dan penyakit-penyakit lain, namun dukungan BP telah membantu daerah ini membuat langkah panjang yang penting ke depan.<sup>9</sup>

Selain itu, kinerja dalam pendekatan BP terhadap lingkungan adalah kelas satu. Meskipun BP masih harus mencapai status hijau/emas yang diinginkan dalam audit lingkungannya

---

<sup>7</sup> Keterangan dari banyak proyek dan jasa yang dipilih oleh DAV dan didanai oleh CAP selama periode ini terdapat dalam Lampiran III.

<sup>8</sup> Lihat laporan TIAP Maret 2009 halaman 33-34, 64-65 dan laporan Maret 2008 halaman 28-29.

<sup>9</sup> Lihat Bagian V(D) di bawah ini.

oleh Kementerian Lingkungan Hidup (“Proper”), hal ini semuanya karena MOE mewajibkan untuk mencapai nilai biru selama empat tahun sebelum berhak untuk mendapat nilai hijau, yang juga harus memperlihatkan keunggulan lingkungan.<sup>10</sup> Kepatuhan saat ini tampaknya tak bercela, dan para staf menunjukkan fokus dan perhatian pada detail lingkungan. Tidak ada indikasi bahwa polutan di Teluk Bintuni meningkat, dan studi terakhir mengenai perikanan, mamalia laut dan bakau pada tahun 2013 tidak memperlihatkan adanya degradasi.<sup>11</sup> Tantangan yang serius adalah untuk mempertahankan keberhasilan ini jika dan ketika ribuan karyawan konstruksi didatangkan ke lapangan. Juga, sementara BP mempunyai kendali terbatas pada emisi karbonnya, satu aspek yang bisa ia atur adalah pembakaran gas. BP telah mengurangi pembakaran secara sangat dramatis selama lima tahun terakhir, hingga kurang lebih 0,5% dari *feed gas*; TIAP mendorong BP untuk meneruskan upaya-upaya pengurangan ini.

Area yang penting di mana kinerja telah meningkat secara dramatis adalah hubungan BP dengan para pejabat setempat yang dipilih. Kemungkinan untuk pertama kali, para pemimpin pada semua tingkat pemerintahan daerah, dari kecamatan hingga kabupaten sampai ke provinsi, merasa puas dengan sikap dan kinerja BP karena hal itu mempengaruhi konstituen mereka.<sup>12</sup> Satu-satunya pengecualian adalah ketidakpuasan di antara sebagian anggota DPRD dan pemimpin adat di MRP, pada tingkat provinsi. Kritik mereka utamanya adalah akibat dari kurangnya informasi yang akurat mengenai program sosial BP, suatu masalah yang dapat diperbaiki dengan komunikasi yang lebih baik.<sup>13</sup> Namun, pada umumnya BP telah mengenali kepentingan dari para pemangku kepentingan setempatnya saat ia menerapkan program-program sosialnya, dan juga (baru-baru ini) berkomunikasi secara lebih efektif dengan para pejabat yang dipilih tersebut dan memperoleh persetujuan mereka.

Akan tetapi, terdapat beberapa masalah serius yang memberikan tantangan, sebagian darinya memerlukan perhatian segera dan kemungkinan penyesuaian. Tantangan pertama adalah ancaman terhadap Keamanan Berbasis Masyarakat Terpadu (“ICBS”). Kendati program ICBS saat ini berjalan dengan efektif, baik dari segi keamanan untuk Tangguh dan interaksinya

---

<sup>10</sup> Untuk mencapai nilai hijau, perusahaan harus mencapai keunggulan lingkungan dalam bidang-bidang ini: 1) EMS; 2) Efisiensi energi; 3) Pengurangan emisi; 4) Konservasi air; 5) Limbah berbahaya; 6) Limbah padat; 7) Perlindungan keanekaragaman hayati; dan 8) Pembangunan masyarakat. Lihat Laporan TIAP Mei 2014 halaman 54 untuk keterangan program Proper.

<sup>11</sup> Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 55.

<sup>12</sup> TIAP tidak bermaksud bahwa sikap positif ini universal. Kendati berada tiga hari di Teluk Bintuni, Panel tidak dapat melakukan perjalanan ke DAV sebelumnya, di pantai utara atau selatan, karena tugas-tugas lain. Sangat mungkin bahwa keluhan-keluhan mungkin telah dikemukakan oleh sebagian di DAV sebelumnya.

<sup>13</sup> Juga terdapat kritik langsung terhadap BP karena tidak membayar ganti rugi atas klaim adat dari suku setempat.

dengan masyarakat, pasukan keamanan publik secara serius mempertanyakan pengandalannya pada pengamanan swasta dan kurangnya keterlibatan polisi dan TNI, sehingga mengancam integritasnya.<sup>14</sup> Pembentukan markas kepolisian yang baru (“Polda”) di Papua Barat dan rencana, dan kemungkinan besar tidak terelakkan, pembentukan komando TNI yang baru (“Kodam”) di Papua Barat, beserta pandangan kuat dari intelijen negara (“BIN”) bahwa satuan pengamanan publik harus lebih aktif di Tangguh dan pada masyarakat, memberikan tantangan serius bagi ICBS. BP harus menekankan komunikasinya dengan para pemangku kepentingan eksternal, terutama dengan pejabat keamanan publik, bahwa manfaat dari ICBS lebih luas daripada hanya menugaskan satuan pengamanan yang telah dilatih dalam hak-hak asasi manusia ke Tangguh. Bagian yang sama pentingnya dari ICBS adalah menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar Proyek berdasarkan saling menghormati.

Tantangan besar lainnya adalah menangani harapan-harapan terkait dengan ekspansi Tangguh, khususnya dalam masyarakat Papua. Tampaknya terdapat kepastian di antara para pemangku kepentingan bahwa Kilang 3 akan terjadi dan pembangunan akan dimulai tahun depan, dan bahwa semua manfaat ekonomi dan komitmen sosial terkait dengan pengembangan tersebut akan dimulai. TIAP, yang tidak mempunyai alat untuk memprediksi masa depan BP dan pengambilan keputusan komersial masa depan dari mitranya di Tangguh, tidak merasa yakin. Apabila Kilang 3 ditunda atau dibatalkan, BP akan ditantang untuk menjaga hubungan harmonisnya dengan masyarakat; akibatnya, bahkan sebelum keputusan investasi final dibuat, BP harus berupaya untuk mendidik masyarakat mengenai kemungkinan bahwa pengembangan mungkin tidak akan dimulai pada tahun 2016.

Kedua aspek yang paling positif dari tantangan ini adalah komitmen terkait dengan listrik dan perumahan di pesisir pantai utara. Pertama, adalah listrik. Menyediakan listrik bagi penduduk Teluk Bintuni sudah merupakan persoalan yang diperdebatkan sejak LARAP awal menjanjikan dan menyediakan listrik berbasis *grid* ke desa-desa pemukiman kembali.<sup>15</sup> Dapat diperkirakan, begitu sebagian desa mempunyai cahaya listrik setiap malam, desa-desa lain juga ingin mendapatkan manfaat yang sama dari Tangguh. BP sudah bersikap responsif terhadap disparitas ini, membangun sub-stasiun 8 MW di lapangan LNG dan bekerjasama dengan PLN untuk menyediakan tenaga listrik berbasis *grid* bagi DAV, Babo dan kota Bintuni. Hasilnya,

---

<sup>14</sup> Lihat bagian IV(C) di bawah.

<sup>15</sup> Lihat laporan TIAP Maret 2007 halaman 25, 29 dan laporan Maret 2006 halaman 27-28.

kota Bintuni dan beberapa DAV di daratan bagian utara sekarang sudah mempunyai interkoneksi, namun hanya ada pembangkit listrik diesel paruh waktu untuk kota Babo dan desa-desa lainnya. Tenaga listrik berbasis *grid* tambahan sudah dibicarakan selama beberapa tahun dengan PLN, yang merupakan satu-satunya entitas yang dapat memasang infrastrukturnya. Akan tetapi, BP harus terus secara aktif mendukung peningkatan-peningkatan ini, yang tidak boleh bergantung pada pembangunan Kilang 3.<sup>16</sup> Sesungguhnya, salah satu alasan fundamental atas hubungan yang harmonis antara BP dan masyarakat adalah keyakinan bahwa BP akan memberikan manfaat ini dalam waktu dekat.

Kedua, dan hampir sama pentingnya, adalah perumahan di pesisir pantai utara. Ini juga sudah merupakan sumber kecemburuan di antara para penduduk desa sejak BP memukimkan kembali Tanah Merah dan membangun kembali desa Saengga dengan perumahan dan infrastruktur yang baru.<sup>17</sup> BP telah beberapa kali memulai program, bekerjasama dengan pemerintah setempat, yang dirancang untuk meningkatkan desa-desa di pesisir pantai utara.<sup>18</sup> Tidak ada satu pun dari program tersebut yang telah berhasil memperbaiki ketimpangan ini. Rencana saat ini adalah melakukan suatu restorasi besar bagi rumah-rumah Masyarakat Asli di kedua distrik pesisir pantai utara, Weriagar dan Tomu. Proyek akan dimulai pada saat pembangunan Kilang 3 dimulai. Secara mendasar, ini adalah suatu program yang dapat didukung oleh TIAP.<sup>19</sup> Akan tetapi, TIAP khawatir dengan reaksi di antara para penduduk desa dan pejabat setempat jika Kilang 3 ditunda dan program perumahan ditunda atau, lebih buruk lagi, dibatalkan. BP harus siap untuk melaksanakan program restorasi perubahan tahun depan apakah Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak.

Area di mana BP telah melakukan kemajuan namun menghadapi tantangan serius yang berkelanjutan adalah pendidikan dan pengembangan bisnis setempat, yang keduanya penting untuk mencapai komitmen AMDAL pembangunan kapasitas Papua. Terdapat konsensus mengenai pentingnya meningkatkan pendidikan dasar dan menengah. BP telah mendukung beberapa mitra pelaksana yang telah bekerja untuk meningkatkan departemen pendidikan setempat, membawa guru-guru ke desa-desa dan memberikan beasiswa bagi murid-murid yang

---

<sup>16</sup> Lihat bagian V(A) di bawah.

<sup>17</sup> Lihat laporan TIAP Februari 2005 halaman 13, 15-16, 21-23 dan laporan Maret 2006 halaman 27-28.

<sup>18</sup> Lihat, misalnya, laporan TIAP Maret 2008 halaman 33.

<sup>19</sup> Lihat Bagian V(B) di bawah.

mempunyai harapan yang baik.<sup>20</sup> Akan tetapi selama ini program tersebut belum mampu membawa banyak murid ke tingkat berikutnya dengan memberikan kesempatan terbaik untuk pendidikan lanjut dan kemungkinan karier di Tangguh. BP telah berkomitmen untuk mendirikan sekolah-sekolah unggulan di beberapa lokasi untuk mendorong tujuan ini, akan tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam 18 bulan sejak kunjungan TIAP terakhir. Sebagaimana dibahas di bawah ini, ini adalah program yang perlu dipercepat.<sup>21</sup>

Pembangunan bisnis setempat juga merupakan bidang di mana kemajuan yang signifikan sedang dilakukan. Beberapa upaya di masa lampau yang bertujuan untuk memperluas kewirausahaan melampaui wirausaha mikro, sementara ini membantu dan bertujuan baik, belum membuahkan hasil yang berarti.<sup>22</sup> Program-program sebelumnya telah direstrukturisasi menjadi Program Pembangunan Kewirausahaan Masyarakat Asli (“IEDP”) beraneka faset yang baru. Dua yang pertama dari program bisnis pribumi yang baru ini adalah fasilitas produksi pakaian dan bengkel reparasi AC, yang keduanya dikelola dan diisi oleh orang-orang Papua, yang dikunjungi oleh TIAP. Keduanya memperlihatkan masa depan yang baik. Pada waktunya, dengan dukungan tetap, bisnis ini serta bisnis-bisnis lainnya harus dimulai dan berkembang. Secara menonjol, seragam dari para pekerja untuk memperbaiki AC, dengan logo Tangguh, merupakan satu dari sedikit simbol pengakuan publik bahwa program-program ini ada karena dukungan Tangguh. Pengakuan ini harus lebih disebarluaskan.

Satu isu tambahan yang telah ditangani dengan baik oleh BP, namun yang masih sensitif dan berpotensi merepotkan, adalah hak atas properti suku dan klaim ganti rugi, atau adat. Isu ini telah mengusik BP sejak permulaan, dan merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah, yang sudah tentu secara hukum memiliki semua sumber daya. Akan tetapi klaim akan terus diajukan terhadap BP sampai masalah itu dipecahkan. Seperti sebelumnya, BP harus mendukung upaya-upaya pemerintah setempat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menerapkan pembagian hasil sumber daya alam Papua berdasarkan Otonomi Khusus (Perdasus DBH).<sup>23</sup> BP juga harus terus mendidik para pemangku kepentingan setempat bahwa ganti rugi adat harus berasal dari pembagian hasil dan bahwa itu

---

<sup>20</sup> Lihat laporan TIAP Maret 2007 halaman 22-23, 27-28, laporan Maret 2008 halaman 29-30, 38-39 dan laporan Maret 2009 halaman 30-32.

<sup>21</sup> Lihat Bagian V(E) di bawah.

<sup>22</sup> Lihat laporan TIAP Maret 2009 halaman 23-26, 61-62, laporan Januari 2011 halaman 21-22 dan laporan Mei 2014 halaman 35-36.

<sup>23</sup> Lihat Bagian VI di bawah.

merupakan tugas pemerintah setempat pada saat ini untuk mewujudkannya.

Meskipun secara umum terdapat kepuasan terhadap BP di antara para pejabat setempat, terdapat dua isu di mana BP dapat menimbulkan ketidakpuasan yang serius di antara para pemangku kepentingan setempat: satu dalam waktu dekat dan satu dalam jangka panjang. Pertama, BP menganggap, dan sekarang telah menanggihkan, suatu perubahan signifikan dalam kebijakan transportasi bagi para pekerja mereka yang berasal dari Teluk Bintuni di Tangguh. Hingga saat ini, para pekerja lokal, pada awal dan akhir *shift* mereka, dijemput dan diantar ke pelabuhan setempat di desa mereka. BP mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah titik-titik ini, sehingga penjemputan dan pengantaran hampir semua pekerja lokal dilakukan pada lokasi pusat dan mewajibkan mereka untuk mencari transportasi sendiri ke dan dari desa asalnya.

Meskipun BP akan menyediakan tunjangan untuk tambahan biaya transportasi mereka, ada kabar burung bahwa perubahan tersebut menimbulkan banyak keresahan. TIAP melihat beberapa potensi konsekuensi negatif yang akan terjadi dari kebijakan ini, termasuk keselamatan, keamanan dan dampak sosial bagi yang terkena pengaruh, bagi pria dan wanita, yang baru saja dibayar gajinya dan dipaksa menghabiskan waktu dalam perjalanan ke desa-desa yang jauh. Perubahan ini juga dapat mengikis semangat dan rasa senang serta kepercayaan penduduk desa terhadap BP. TIAP melihat hanya sedikit, jika ada, manfaat yang berarti. Untunglah BP telah menetapkan untuk tidak melakukan perubahan tersebut saat ini, namun akan melihat kembali kemungkinan perubahan-perubahan setelah pemerintah kabupaten melaksanakan layanan taksi air setempat yang berfungsi di Teluk Bintuni, yang merupakan prioritas dari Bupati saat ini. TIAP mendukung penundaan ini.

Kemungkinan perubahan ini juga mengilustrasikan dua isu penting yang lebih luas. Pertama, sebagaimana disebutkan di atas, potensi bahwa pemotongan biaya jangka pendek dapat memengaruhi kepercayaan dan itikad baik jangka panjang; dan kedua, pentingnya berkonsultasi dengan para pekerja dan pimpinan lokal sebelum melakukan perubahan kebijakan yang secara signifikan memengaruhi kehidupan penduduk Papua setempat.

Isu kedua yang memerlukan perhatian segera dan fokus berkelanjutan dari BP untuk ke depan adalah perekrutan, retensi dan promosi orang Papua. Sudah terdapat beberapa pengulangan dari Program Pembangunan Papua dari BP selama 10 tahun terakhir<sup>24</sup>, namun

---

<sup>24</sup> Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 38-40, laporan Januari 2011 halaman 20-21 dan laporan Maret 2009



tidak ada yang menghasilkan momentum yang kemungkinan diperlukan untuk memenuhi komitmen AMDAL BP sebesar 85% pekerjaan bagi orang Papua dan 35% manajer orang Papua sebelum tahun 2029. Program tersebut telah terhambat dengan hanya sedikit lebih dari 50% karyawan Papua dan sejauh ini masih harus menghasilkan sejumlah orang Papua yang dapat naik tingkat ke posisi penyelia dan manajemen. BP perlu menangani masalah perekrutan dan retensi/promosi dari program ini.<sup>25</sup>

Mengenai masalah perekrutan, BP telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung dan bermitra dengan sekolah politeknik yang baru di Fakfak. Fasilitas pelatihan teknik dua tahun yang baru ini menghasilkan lulusan pertamanya tahun ini. BP perlu merekrut jumlah yang cukup dari para lulusan ini, atau yang lain dari sekolah-sekolah di Papua, setiap tahun untuk mengisi lowongan teknik tingkat awalnya. Secara terpisah, sulit untuk memaksakan target mempekerjakan orang Papua pada kontraktor, kendati sudah diupayakan untuk melakukan hal itu.<sup>26</sup> Menanggapi hal ini, BP sedang mempertimbangkan untuk mengonversi pekerjaan kontraktor tertentu kepada karyawan langsung BP. Kemungkinan perubahan ini berpotensi untuk memperbaiki paling sedikit sebagian dari kekurangan ini. Untuk memperoleh hasil yang diperlukan, upaya ini harus menjadi fokus dari manajemen senior yang harus memilikinya dan bertanggung jawab atas keberhasilannya.

Mengenai retensi/promosi, langkah-langkah yang telah diambil oleh BP, kendati bermanfaat, belum cukup, dan harus dipercepat.<sup>27</sup> BP patuh terhadap kebijakan meritokrasi begitu seorang karyawan dipekerjakan. TIAP mendukung sepenuhnya kebijakan ini. Namun jelas bahwa kebanyakan orang Papua memerlukan dukungan yang secara signifikan lebih besar begitu dipekerjakan, jika mereka akan naik ke tingkat penyelia dan manajer. Kebutuhan ini termasuk pembimbingan, pelatihan, pelatihan bahasa Inggris dan komunikasi yang lebih baik dengan manajemen. BP harus menugaskan seorang manajer senior di Indonesia, mungkin VP Sumber Daya Manusia, untuk bertanggung jawab atas retensi dan promosi orang Papua. Manajer tersebut harus menjadwalkan pertemuan berkala dengan perwakilan dari karyawan Papua, untuk menciptakan suatu dialog berkelanjutan dengan staf agar dapat menangani kebutuhan mereka secara lebih baik dan untuk memberikan kepada BP kesempatan untuk secara

---

halaman 62-63, 68-69.

<sup>25</sup> Lihat Bagian V(C) di bawah.

<sup>26</sup> Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 41 dan laporan Oktober 2012 halaman 33.

<sup>27</sup> Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 40 dan laporan Januari 2011 halaman 20-21.

lebih efektif menjelaskan rencana-rencana pembangunan Papua. Sejak kunjungan TIAP, BP telah memulai dialog tersebut dan memulai perubahan signifikan lain untuk meningkatkan hasil dari program pembangunan Papua. Ini cukup menggembirakan. Akan tetapi manajemen juga harus menugaskan target-target pembangunan Papua kepada setiap manajer tingkat menengah di Tangguh, dan mendorong target-target tersebut dengan memasukkan pencapaiannya sebagai bagian dari evaluasi tahunan para manajer. Target harus dievaluasi dan disesuaikan setiap tahun, untuk meletakkan BP pada arah untuk mencapai atau melampaui komitmen AMDALnya sebelum tahun 2029. Perubahan-perubahan yang diusulkan oleh BP cukup menjanjikan, namun tanpa metrik yang harus ditegakkan, TIAP khawatir BP tidak akan memenuhi AMDAL ini.<sup>28</sup>

### **III. Rekomendasi**

#### **Masalah-masalah yang Disorot**

- 1. BP harus memberitahukan kepada para pemimpin dan masyarakat mengenai kemungkinan bahwa pengembangan Tangguh mungkin tidak akan dimulai tahun 2016.**
- 2. Penyediaan listrik untuk Babo dan DAV lain harus segera dilanjutkan, apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak.**
- 3. BP harus siap untuk memulai program restorasi perubahan untuk desa-desa di daratan bagian utara apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak.**
- 4. Komitmen BP untuk mendirikan sekolah unggulan di Teluk Bintuni bagi siswa yang paling menjanjikan seharusnya tidak ditunda lagi.**
- 5. BP harus terus mendidik para pemangku kepentingan setempat bahwa ganti rugi adat harus berasal dari pembagian hasil dan bahwa itu merupakan tugas pemerintah setempat pada saat ini untuk mewujudkannya.**
- 6. BP seharusnya tidak melakukan perubahan apa pun dalam kebijakan tentang transportasi pekerja lokal sampai BP berkonsultasi dengan para pekerja lokal dan pemimpin pemerintahan untuk menjajaki opsi-opsi lain.**
- 7. Perekrutan orang Papua yang terampil, serta retensi dan promosi orang Papua, harus menjadi fokus manajemen senior, yang bertanggung jawab atas**

---

<sup>28</sup> Lihat Bagian V(C) di bawah.

keberhasilannya. Seorang manajer senior di Indonesia harus mengadakan pertemuan berkala dengan perwakilan dari pekerja Papua.

8. Komunikasi dengan anggota DPRD dan MRP, yang keduanya memainkan peran penting dalam pemerintah Papua, harus ditingkatkan dan diadakan secara berkala.
9. Pemeliharaan gedung administrasi dan asrama di Tangguh telah diabaikan atau ditunda. BP harus meninjau ulang kegiatan perbaikannya dan menegakkan standar yang ketat terhadap personelnya sendiri serta kontraktornya.
10. Logo Tangguh harus dipakai secara lebih luas untuk mendidik penduduk setempat mengenai manfaat yang diperoleh dari program-program yang didukung oleh Tangguh.
11. BP harus terus menjanjikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai status hijau dan akhirnya emas dalam penilaian lingkungannya. BP juga harus melanjutkan upaya untuk mengurangi pembakaran gas alam.

#### **Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia**

12. BP harus menentang setiap perubahan pada ICBS, dan berupaya meneruskan perjanjian JUKLAP/PAMBERS dengan polisi selama jangka waktunya saat ini. Bila perlu, BP harus mendapatkan dukungan dari SKKMigas, Kapolda di provinsi Papua dan lainnya untuk mempertahankan JUKLAP/PAMBERS hingga tahun 2019.
13. BP harus memberikan akses yang wajar dan, bila diminta, menjadwalkan kunjungan oleh Kapolda dan pejabat kepolisian lain ke Tangguh, namun harus menolak setiap kehadiran tetap polisi di lapangan LNG atau desa-desa di sekitarnya.
14. Fokus BP dengan komando kepolisian yang baru haruslah pada familiarisasi dan implementasi prinsip-prinsip ICBS dari JUKLAP/PAMBERS, termasuk ketiga lingkaran pengamanan, pelatihan tentang hak-hak asasi manusia bagi seluruh staff keamanan swasta dan polisi yang mungkin dipanggil dan pelatihan tahunan dengan partisipasi penuh kepolisian.

15. Jika dan ketika komando TNI yang baru dibentuk di Papua Barat atau Teluk Bintuni, komunikasi dan edukasi dengan para pimpinannya mengenai ICBS harus menjadi prioritas BP.
16. Komunikasi berkala harus diadakan dengan BIN, yang harus diundang untuk mengamati pelaksanaan pelatihan bersama tahunan dan untuk mengunjungi Tangguh. Akan tetapi, setiap permohonan kepada BP untuk mendukung kegiatan intel reguler atau tetap di lapangan LNG atau di desa-desa sekitarnya harus ditolak.
17. BP harus juga menekankan dalam komunikasinya dengan pemangku kepentingan eksternal, terutama dengan pejabat keamanan publik, bahwa bagian penting dari ICBS adalah menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar proyek berdasarkan saling menghormati.
18. BP harus menggunakan Genting secara langsung menyangkut pengaturan keamanan, menawarkan untuk berbagi pengalamannya dengan ICBS dan mengundang para pejabat keamanan Genting untuk mengamati pelaksanaan pelatihan tahunan; BP juga harus terus meminta SKKMigas dan pihak lain untuk mendorong Genting agar tidak menggunakan TNI atau polisi untuk pengamanan lapangan.

#### **Listrik dan Daya**

19. Berkoordinasi dengan SKKMigas, dan bekerjasama dengan PLN, BP harus mengembangkan suatu jadwal bertahap untuk memperluas jangkauan listrik ke setiap desa di mana infrastruktur sudah tersedia.
20. Di area-area di mana PLN masih harus membangun *grid*, BP harus meningkatkan dukungannya untuk kapasitas pembangkit diesel sehingga, paling tidak, fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas dapat mengandalkan tenaga listrik yang cukup dan berkelanjutan.
21. BP harus bekerjasama dengan SKKMigas, ESDM dan mitra regionalnya untuk memastikan bahwa LNG dapat disediakan bagi tenaga listrik Papua segera setelah dapat dilakukan secara teknis dan hukum.

#### **Perumahan Pesisir Pantai Utara**

22. **BP juga harus meminta dukungan dari SKKMigas dan Bupati yang baru untuk memulai program restorasi perubahan di pesisir pantai utara pada tahun 2016, jika perlu, kendati jika izin akhir ekspansi Tangguh ditunda.**

#### **Pekerjaan Bagi Orang Papua**

23. **Perekrutan orang Papua perlu menjadi tanggung jawab utama dari manajer senior. Selain itu, metriks interim harus dibuat, paling tidak secara tahunan, untuk mengukur kemajuan dari setiap komponen dan untuk melakukan penyesuaian apabila target tidak dicapai.**
24. **Retensi dan promosi karyawan Papua juga harus menjadi tanggung jawab pejabat tingkat tinggi BP, kemungkinan Vice President Sumber Daya Manusia atau manajer lapangan untuk Tangguh. Metriks khusus harus dipakai untuk mengukur kinerja, dan manajemen senior harus bertanggung jawab. Semua manajer senior harus diwajibkan untuk menjadi mentor atau pelatih teknis bagi orang Papua. Semua manajer yang lain harus didorong untuk melakukan hal itu, dan diberi penghargaan untuk melakukan hal itu secara efektif.**
25. **Komunikasi manajemen dengan karyawan Papua harus ditingkatkan dan dilakukan secara berkala. Para pekerja Papua di Tangguh, atau grup perwakilan yang ditunjuk, harus bertemu secara berkala dengan manajer senior BP yang bertanggung jawab atas retensi dan promosi orang Papua.**
26. **Sepanjang memungkinkan, karyawan Papua dari kontraktor utama yang bekerja di Tangguh juga harus diikutsertakan dalam komunikasi ini untuk memberikan kepada BP pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan-kesulitan yang ditemui para kontraktor dalam penerapan program retensi dan promosi orang Papua.**

### **Pemeliharaan Kesehatan**

27. BP harus terus mendukung kapasitas dari dinas kesehatan kabupaten, dan bagi puskesmas yang melayani desa-desa di pesisir pantai utara dan selatan. BP harus menjelaskan kepada Bupati yang baru tentang kesediaannya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemeliharaan kesehatan untuk kabupaten.

### **Pendidikan**

28. Pendirian sekolah unggulan yang pertama di Teluk Bintuni harus merupakan prioritas pendidikan BP dengan target tanggal sebelum tahun 2019.

### **Pengembangan Usaha Orang Papua**

29. BP harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya beli pertanian dan perikanan lokal hingga 65% dari kebutuhan operasional Tangguh, apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak.
30. Pengadaan dan grup Manajemen Rantai Pasokan di Tangguh harus mengidentifikasi produk dan jasa yang potensial yang memenuhi syarat untuk pengadaan non-kompetitif dan mengomunikasikan hasilnya secara luas sehingga bisnis Papua dapat berfokus untuk melayani kebutuhan ini.
31. BP harus terus mendukung Jasa Pengembangan Bisnis (BDS) dalam upayanya untuk menciptakan IP tambahan menjalankan bisnis di Bintuni dan kota-kota lain di wilayah ini namun harus menekankan pelatihan dan pembimbingan untuk IP untuk menghindarkan ketergantungan jangka panjang pada BP.

## **IV. Berita Terkini Tentang Politik dan Keamanan**

### **A. Latar Belakang Politik Nasional**

Presiden Joko Widodo (“Jokowi”), Gubernur Jakarta yang baru, diangkat pada bulan Oktober lalu setelah bertarung dengan sengit dalam kampanye. Pada awalnya ia dicalonkan oleh partainya, PDI-P, yang diketuai dan dikendalikan oleh Megawati Sukarnoputri, Presiden sejak tahun 2001 – 2004, putri dari bapak pendiri, Sukarno. Dengan berbagai dalil, dengan segan ia mengizinkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin mengakui popularitasnya yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Sebagaimana umumnya dalam politik nasional Indonesia akhir-akhir ini, Jokowi pada akhirnya didukung oleh sejumlah partai, dan

menjadi calon dari koalisi enam partai yang dinamakan Koalisi Indonesia Hebat. Lawannya, mantan Jenderal Prawobo Subianto (“Prabowo”), adalah menantu Suharto yang karismatik yang telah naik ke tingkat tertinggi dalam militer namun telah tersangkut dengan masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh TNI di Timor Timur, Papua, dan di tempat lain. Ia mendirikan partainya sendiri, Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) sebagai kendaraan politiknya, dan menjadi kandidat dari koalisi multipartai yang mewakili kebanyakan dari elit Suharto. Jokowi akhirnya menang sekitar 6%, setelah memimpin dalam hampir semua jajak pendapat sebesar 20% atau lebih selama beberapa bulan sebelum pemilihan umum. Akan tetapi, koalisi Prabowo memenangi mayoritas dari anggota DPR yang baru.

Sebagian, Jenderal Prabowo mendapatkan perolehan yang signifikan dengan mengadopsi pendekatan nasionalis otoritarian yang kuat, yang menarik bagi pendukung dan sentimen anti-asing, dan mendukung diubahnya sistem pemilihan langsung pada tingkat provinsi dan daerah.<sup>29</sup> Jokowi juga memainkan sentimen nasionalistik, misalnya, dengan menyatakan maksudnya untuk membuat pembatasan-pembatasan baru untuk membatasi masuknya bisnis asing. Ia tidak menekan dengan keras di hadapan apa yang tampak sebagai perasaan yang populer.<sup>30</sup> Tema kampanye utamanya adalah pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi, isu yang telah membuat dia melompat dengan cepat dari walikota sebuah kota kecil menjadi Gubernur Jakarta.

Pada awalnya, Jenderal Prabowo menolak untuk mengakui hasil pemilihan umum, naik banding ke pengadilan dan memperlama hasilnya sedapat mungkin. Karena jumlah anggota DPR Jokowi yang minoritas, kurangnya kepemimpinannya dalam partainya sendiri, dan koalisi besar yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan umum, ia memilih kabinet dengan elit dari banyak partai yang mempunyai sedikit loyalitas, jika ada, kepadanya atau pada kebijakannya. Akibatnya, Jokowi memulai tugas Kepresidenannya dengan mayoritas oposisi di DPR, partai yang tidak ia kendalikan dan kelompok Menteri yang tidak sejalan, banyak dengan agenda masing-masing. Tidak mengherankan, ia telah menemui kesulitan besar dalam membangun kepemimpinan atau membuat kebijakan.

Selama tahun pertama pemerintahan Jokowi, telah terdapat beberapa perkembangan politik yang signifikan yang mengindikasikan paling tidak potensi untuk meningkatkan

---

<sup>29</sup> Lihat “Direct Elections Un-Indonesian: Prabowo,” *The Jakarta Globe*, 1 Juli 2014.

<sup>30</sup> Lihat “Firm Nationalist Views Shared” *The Jakarta Post*, 16 Juni 2014.

kendalinya terhadap pemerintah, dan kemungkinan mengurangi antipati terhadap investasi asing. Pertama, Prabowo memperlunak oposisinya, bahkan mendukung Jokowi secara aktif dalam beberapa hal.<sup>31</sup> Bahkan, akhir-akhir ini banyak dari oposisi Jokowi yang paling kuat berasal dari partainya sendiri, PDI-P. Kedua, sebagai hasil dari manuver partai, koalisi Jokowi memperoleh mayoritas di DPR, paling tidak untuk saat ini. Dan ketiga, Jokowi memecat beberapa Menteri dan “mengocok ulang” kabinetnya dalam upaya untuk mendapatkan kendali dan memberikan stabilitas ekonomi. “Pengocokan ulang” telah menghasilkan dua prakarsa ekonomi: paket deregulasi/stimulus yang luas dan insentif yang lebih terfokus bagi para investor untuk meningkatkan aset di pasar modal Indonesia.<sup>32</sup> Baru-baru ini, Jokowi mengindikasikan dalam kunjungannya ke Washington bulan Oktober bahwa Indonesia ingin turut serta dalam Trans-Pacific Partnership (Kemitraan Trans-Pasifik). Waktu yang akan membuktikan apakah perubahan-perubahan ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih terkoordinasikan dan ramah investasi asing.

Contoh dari kebijakan terputus yang secara khusus relevan dengan Tangguh adalah prakarsa baru Jokowi mengenai Papua. Ia telah menyatakan minat besar dalam meningkatkan ekonomi Papua dan mendamaikan keluhan-keluhan di masa lampau.<sup>33</sup> Dalam kunjungan pertamanya ke Papua sebagai Presiden pada bulan Desember 2014 untuk merayakan hari Natal, ia mengatakan kepada publik di Jayapura bahwa pemerintah akan membentuk sebuah tim pencari fakta untuk menyelidiki penembakan baru-baru ini terhadap lima orang sipil muda di provinsi itu oleh pihak keamanan, yang ia katakan “patut disesali”.<sup>34</sup>

Dalam kunjungan keduanya bulan Mei (itu sendiri tidak pernah diketahui sebelumnya bahwa ia akan kembali ke Papua secepat itu) Presiden menasihatkan TNI dan Kepolisian untuk mengubah pendekatan mereka dalam menangani konflik di Papua: “Saya mengharapkan pendekatan di Papua diubah dari pendekatan keamanan represif menjadi pendekatan berdasarkan pembangunan dan kesejahteraan,” ia ucapkan di hadapan ratusan tentara TNI dan

---

<sup>31</sup> Lihat “Checkmate: Jokowi Gets the Go-Ahead From Opposition,” THE JAKARTA GLOBE, 29 Jan. 2015.

<sup>32</sup> “Kami sedang membuat (berinvestasi di Indonesia) semenarik mungkin,” ucap Menteri Ekonomi Darmin Nasution, mengumumkan langkah-langkah terakhir bersama dengan beberapa menteri lain. “Kita harus menetapkan, memudahkan, dan membuatnya lebih murah.” 1 Okt. 2015.

<sup>33</sup> Ini tidak dimaksudkan bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berupaya untuk meningkatkan ekonomi Papua. Ia mempunyai beberapa prakarsa, termasuk Perjanjian Baru untuk Papua pada tahun 2008 dan Satuan Kerja UP4B, yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur di Papua, tahun 2012.

<sup>34</sup> “Joko Pledges to Resolve Papua Shootings,” THE JAKARTA GLOBE, 29 Des. 2014.



perwira Kepolisian di markas komando regional militer (“Korem”).<sup>35</sup>

Ia juga mengumumkan agar wartawan asing dan yang lain akan diizinkan melakukan perjalanan ke Papua tanpa izin khusus (SKJ yang diperlukan bagi semua orang asing) dan agar lima tahanan politik Papua akan segera diberikan grasi dan sampai dengan 90 orang juga dapat dibebaskan (sebagian rupanya menolak tawaran ini, dan sebaliknya memohon amnesti). Selanjutnya beliau mengumumkan beberapa proyek infrastruktur bagi Papua, termasuk jalan trans-Papua, jembatan baru dan kabel serat optik internet bawah laut yang menghubungkan Papua dengan provinsi-provinsi lain.<sup>36</sup>

Kunjungan Jokowi ke Papua tampaknya memperlihatkan perhatian yang tulus untuk masalah-masalah pembangunan dan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, tak lama sejak Jokowi mendarat kembali di Jakarta, kedua prakarsa ini ditentang bukan saja oleh anggota senior DPR, tetapi juga oleh Menteri-menterinya sendiri dan TNI. Menyangkut wartawan asing di Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan, Purdijatno (sejak diberhentikan) mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan tim “*clearance house*” (rumah pemeriksaan) kontroversialnya, yang menyelidiki kunjungan para wartawan asing ke Papua. “Kami tidak memata-matai mereka [wartawan] Kami hanya memantau kegiatan mereka.” Secara terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk membuka Papua selama wartawan asing membantu mengomunikasikan kepentingan Indonesia: “Kami akan mendukung mereka jika mereka membuat laporan yang bagus, namun kami akan dengan mudah mengusir mereka jika mereka kedapatan melakukan hasutan.”<sup>37</sup> Menyangkut pembebasan tahanan politik, Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah untuk segera merumuskan peta jalan untuk mengurangi gerakan separatis di Papua sebelum memberikan amnesti.<sup>38</sup>

Pada saat ini, perubahan dalam akses dan kemungkinan pembebasan tahanan tambahan

---

<sup>35</sup> “President Advises Indonesian Military, National Police to Change Approach in Papua,” INVESTOR DAILY, 11 Mei 2015.

<sup>36</sup> Pada saat peresmian Sistem Kabel, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan Rp. 4 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Papua Barat tahun 2015. Lihat [www.pasificpos.com](http://www.pasificpos.com), 12 Mei 2015.

<sup>37</sup> “Jokowi’s ministers reluctant to open up Papua,” THE JAKARTA POST, 27 Mei 2015; lihat juga “The National Intelligence Agency (BIN) will monitor the activities of foreign journalists in the future to avoid certain parties from taking advantage of these journalists.” SINAR HARAPAN, 27 Mei 2015. Selain itu, kami mencatat bahwa kunjungan TIAP ke Papua pada September masih memerlukan permohonan dan persetujuan dari SKJ.

<sup>38</sup> “House Questions Amnesty for Political Prisoners in Papua,” KORAN TEMPO, 25 Jun. 2015.

telah paling tidak ditunda atau dilarutkan dan kemungkinan diblok oleh oposisi ini.<sup>39</sup> Jadi, maksud untuk mengubah kebijakan bagi Papua mungkin tidak dapat dengan mudah diterjemahkan ke tindakan eksekutif.

Dalam minggu-minggu setelah kunjungannya, Jokowi mengumumkan beberapa prakarsa tambahan. Pertama, terlantiknya Jokowi sebagai Presiden RI menandai berakhirnya kreasi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk Pembangunan Papua – UP4B – dan menciptakan kendaraan baru untuk mempercepat pembangunan sumber daya alam di Papua. Peraturan tersebut menempatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai penanggung jawab, namun memberikan mandat awal hanya hingga Desember 2015. Pada saat TIAP berkunjung, Menteri yang bersangkutan belum berkunjung ke Papua.<sup>40</sup> Presiden juga mengumumkan bahwa ia akan mengunjungi Papua tiga atau empat kali setahun<sup>41</sup> dan akan membangun rumah dinas di Papua di mana ia dapat menerima tamu dan berinteraksi secara dekat dengan penduduk.<sup>42</sup> Tidak jelas apakah perhatian yang meningkat ini akan menghasilkan penurunan ketegangan.

## **B. Berita Terkini tentang Politik/Ekonomi Papua**

Papua Barat pada umumnya stabil secara politik dan telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Pengalihan penghasilan yang besar telah dicurahkan ke provinsi Papua dan Papua Barat sejak Otonomi Khusus (“Otsus”) diberlakukan tahun 2001, dan jumlah ini terus berkembang. Dalam tahun-tahun terakhir, dana Otsus utama telah berkembang dari Rp. 1,7 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp. 2,78 triliun (sekitar \$200 juta) di tahun 2015.<sup>43</sup> Tambahan dana sekitar Rp. 750 milyar di tahun 2015 didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Pendapatan terkait dengan

---

<sup>39</sup> Pada tanggal 19 November 2016, Filep Karma, orang Papua yang dihukum 15 tahun penjara karena memimpin demonstrasi untuk mengibarkan bendera Bulan Sabit pada tahun 2004, dibebaskan empat tahun sebelum hukumannya berakhir. Ini adalah perkembangan yang menjanjikan.

<sup>40</sup> Anggota lain termasuk menteri energi, keuangan, dalam negeri, hukum, lingkungan dan kehutanan, BUMN, industri, perdagangan, dan agraria. Juga termasuk dalam tim adalah jaksa agung, kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM), gubernur Papua, gubernur Papua Barat, dan deputi untuk pemantauan dan evaluasi dari Kantor Staf Kepresidenan.

<sup>41</sup> Sebaliknya, SBY hanya mengunjungi Papua tiga kali dalam 10 tahun masa jabatannya.

<sup>42</sup> “Jokowi to Build Official Residence in Papua,” THE JAKARTA POST, 30 Juli 2015.

<sup>43</sup> Total pendanaan untuk dua provinsi pada tahun 2015 adalah Rp. 9,5 triliun, termasuk Rp. 2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Lihat “Papua, Papua Barat to Receive Rp 9.5 Trillion in Special Autonomy, Infrastructure Development Funds in 2015,” [www.detik.com](http://www.detik.com), 24 Agst. 2014. Lihat juga laporan TIAP Mei 2014 halaman 49-52 dan laporan Oktober 2012 halaman 39-40.

produksi sumber daya alam juga terus meningkat. Pada tahun 2014 (tahun paling akhir yang tersedia) pendapatan dari sumber daya alam untuk provinsi, kebanyakan dari Tangguh, mencapai Rp. 1,425 triliun, sekitar 26% dari pendapatan provinsi total.<sup>44</sup>

Di bawah Otonomi Khusus, Papua Barat dan kabupaten serta kotanya akan menerima 70% pendapatan setelah pajak dari produksi gas alam, ketimbang 30% yang dialokasikan untuk provinsi-provinsi lain, hingga 2026.<sup>45</sup> Dari jumlah ini, hanya 6% diberikan langsung ke provinsi, sementara 40% dimaksudkan untuk dialokasikan oleh sebuah peraturan khusus, yang disebut Perdasus DBH. Pada tahun 2014, sebagai bagian dari proses AMDAL, akhirnya kesepakatan dicapai oleh semua pihak mengenai Perdasus. Berdasarkan perjanjian tersebut, separuh dari pendapatan ini, atau 20% dari total, akan didedikasikan untuk dana amanah adat yang akan dibagi untuk mendanai pembangunan saat ini dan kebutuhan masa depan dari Masyarakat Asli.<sup>46</sup> Perjanjian ini didukung oleh Pemerintah Indonesia. Sayangnya, sebagai akibat dari perselisihan politik di DPRD provinsi, dan pemilihan DPRD baru tahun 2014, Perdasus DBH belum disahkan. Sulit untuk memprediksi kapan atau apakah Perdasus tersebut akan disahkan.

BP telah membangun hubungan baik dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Gubernur Atururi akan menyelesaikan masa jabatan kedua dan terakhirnya pada bulan Januari 2017. Wakil Gubernur, dan Bupati Teluk Bintuni, yang mendukung pengembangan Tangguh dan komitmen BP dalam AMDAL, adalah calon kandidat yang akan menggantikannya.

Ekonomi Papua Barat secara resmi bertumbuh 5,38% di tahun 2014 (kira-kira tingkat pertumbuhan negara secara keseluruhan). Ini tentu termasuk pendapatan dari Tangguh, di mana dalam data pemerintah menunjukkan 55% dari pertumbuhan ini. Pembangunan baru di Manokwari dan Bintuni sudah nyata, dan banyak konstruksi sedang berjalan. Akan tetapi, bahkan dengan pembangunan ini, Papua Barat masih berada pada ranking 30 dari 33 provinsi dalam mutu indeks manusianya dan ranking 32 dari 33 dalam persentasi penduduk miskin.

Teluk Bintuni juga sedang berkembang, di mana banyak pembangunan difokuskan pada kota Bintuni, yang mungkin sekarang mempunyai populasi sebesar 21.000, sekitar separuh

---

<sup>44</sup> Jumlah ini dapat meningkat di tahun 2015 sebagai akibat dari penurunan harga LNG. Lihat Lampiran IV untuk ringkasan tentang sumber pendapatan Papua Barat dan Teluk Bintuni.

<sup>45</sup> Pembagian pendapatan ini diuraikan lebih lengkap dalam laporan TIAP Mei 2014 halaman 50.

<sup>46</sup> Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 51 untuk uraian lengkap Perdasus DBH.

dari keseluruhan kabupaten.<sup>47</sup> Pendapatan bagi kabupaten telah naik sekitar lebih dari 25% dalam dua tahun terakhir, mencapai Rp. 1,1 triliun pada tahun 2014. Hasil ini kebanyakan dari pendapatan sumber daya alam dari Tangguh, yang mencapai tingkat tertinggi sebesar Rp. 246 milyar, atau 22% dari total pendapatan Teluk Bintuni, pada tahun 2014.<sup>48</sup> Bupati, Alfons Manibui, merasa puas dengan kemajuan dalam pembangunan manusia yang dicapai selama masa jabatannya dan kontribusi yang diberikan oleh BP.<sup>49</sup> Ia akan menyelesaikan masa jabatan keduanya pada bulan November dan dibatasi masa jabatan.

Salah satu dari banyak peningkatan yang nyata pada infrastruktur lokal adalah sistem transportasi bus yang baru, yang digunakan oleh TIAP. Bus-bus modern ini disponsori oleh Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni, yang didukung oleh BP.<sup>50</sup> Pembangunan jalan juga berkembang luas. Rumah sakit yang dibangun tahun 2013 telah berkembang, memiliki perlengkapan yang lebih baik dan terus berkembang.<sup>51</sup> Akan tetapi, terdapat pemahaman publik yang terbatas bahwa dukungan BP adalah bermanfaat pada peningkatan ini.

Hanya sedikit dari pembangunan ini yang telah mencapai desa-desa terpencil di Teluk Bintuni. Meskipun infrastruktur dasar, seperti jalan dan pelabuhan, gereja dan masjid, sudah ditingkatkan sejak satu dekade yang lalu, masih terdapat sedikit layanan kesehatan setempat, hampir tidak ada transportasi darat (khususnya di pesisir pantai utara), pendidikan minimal, perumahan buruk dan, dalam banyak hal, tidak ada listrik yang dapat diandalkan.

Berdasarkan AMDAL yang baru, kabupaten Fakfak, di bagian barat Tangguh di sisi selatan Teluk Bintuni, akan menjadi kabupaten yang memproduksi karena pembangunan Kilang 3 mungkin mencakup anjungan dan beberapa sumur produksi di Fakfak. Akibatnya, Masyarakat Aslinya akan menjadi bagian dari program sosial Tangguh. Fakfak merupakan pusat sejarah yang lebih mapan, dengan pelabuhan yang signifikan dan pembangunan ekonomi yang lebih luas daripada Teluk Bintuni. Untuk pertama kalinya, TIAP bertemu dengan para pejabat dari Fakfak. Bupati, yang mengunjungi Tangguh untuk pertama kalinya, optimis tentang hubungan baru kabupatennya dengan Tangguh. Secara signifikan, kabupaten ini baru

---

<sup>47</sup> Bintuni dalam Angka 2014.

<sup>48</sup> Berdasarkan Otonomi Khusus pembagian pendapatan dari sumber daya alam, kabupaten yang memproduksi menerima 12% dari pendapatan total setelah pajak. Perlu diperhatikan bahwa Rp 246 milyar juga termasuk pendapatan minyak dari Sorong Petrochina, penebangan kayu dan minyak kelapa sawit.

<sup>49</sup> Bupati memperkirakan bahwa sekitar 40% dari penduduk berada di bawah garis kemiskinan, turun dari sekitar 60% tahun 2005. Namun ia menambahkan bahwa indeks kebahagiaan cukup tinggi.

<sup>50</sup> Lihat laporan TIAP Maret 2009 halaman 26-28.

<sup>51</sup> Lihat Bagian V(D) di bawah.

saja membuka sebuah lembaga politeknik pertama di Papua untuk melatih lulusan sekolah menengah atas dalam keterampilan teknik mesin, teknik sipil dan ilmu komputer. Kelas pertama yang terdiri dari 54 murid lulus bulan September. TIAP berharap agar sekolah politeknik ini akan memainkan peranan utama dalam perekrutan orang Papua untuk Tangguh.<sup>52</sup>

### **C. Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia di Papua dan di Tangguh**

Situasi keamanan di Papua pada umumnya stabil, kendati terus terjadi insiden terisolir tentang kekerasan dan reaksi oleh pasukan keamanan yang telah mengakibatkan cedera dan kematian.<sup>53</sup> Terdapat sedikit bukti mengenai kekerasan separatis terorganisir. Kebanyakan insiden penembakan terjadi di provinsi Papua,<sup>54</sup> dan banyak terjadi di dataran tinggi, dan tidak ada yang di dekat Tangguh, meskipun insiden serius terjadi di Manokwari dan Sorong.<sup>55</sup>

Daerah Teluk Bintuni damai dan tidak ada kekerasan politik atau agama saat ini. Selama 18 bulan terakhir, terdapat perselisihan pribadi atau suku yang telah menjadi sengit, dan beberapa protes masyarakat yang tidak sengit di Babo terkait dengan Tangguh.<sup>56</sup> ICBS terus berfungsi dengan baik, dengan kerjasama dari semua yang terlibat dan dukungan dari polisi untuk pelaksanaan pelatihan tahunan dan pelatihan tentang hak-hak asasi manusia; akan tetapi, terdapat beberapa ancaman serius kepada ICBS dari sektor keamanan publik, sebagian karena ini masih relatif merupakan model pengamanan yang baru. Setelah hampir satu dekade mengalami stabilitas, terdapat kemungkinan perubahan dalam kebijakan keamanan oleh TNI dan polisi, serta tekanan dari BIN. Terdapat juga ancaman-ancaman terkait dengan pasukan keamanan yang digunakan oleh Genting Oil untuk mengawal kegiatannya di sekitar lapangan LNG.

Pertama, kepolisian telah mendirikan sebuah komando di Papua Barat di Manokwari (“Polda”); oleh sebab itu, Kapolda di provinsi Papua (Jayapura) tidak akan memiliki tanggung jawab untuk keamanan Tangguh. Walaupun restrukturisasi ini seharusnya tidak menyebabkan

---

<sup>52</sup> Lihat Bagian V(C)(1) di bawah ini.

<sup>53</sup> Lihat, misalnya, “Joko Pledges to Resolve Papua Shootings,” THE JAKARTA GLOBE, 29 Des., 2014.

<sup>54</sup> Ada 12 insiden penembakan dari tahun 2014 hingga Juni 2015 di provinsi Papua. Insiden kekerasan yang paling serius baru-baru ini adalah di Tolikara (di dataran tinggi) tanggal 20 Jul, pada saat sekelompok umat Kristen memprotes suara keras dari shalat Idul Fitri. Sebagian membakar toko-toko milik orang Muslim pendatang dan api menjalar ke Masjid di dekatnya, untung dalam keadaan kosong. Penduduk Muslim setempat dengan aman melaksanakan shalat Idul Fitri di lapangan dekat markas militer. Lihat, “Officials Fear Backlash in Papua Mosque Burning,” THE JAKARTA GLOBE, 22 Jul. 2015.

<sup>55</sup> Lihat misalnya “Police hunt for instigators of 'religious strife' in Sorong,” THE JAKARTA POST, 23 Apr. 2014.

<sup>56</sup> Menurut Catatan Insiden Keamanan Tangguh, terdapat tiga insiden serupa selama periode ini.

perubahan dalam kebijakan, komando kepolisian yang baru telah menyatakan bahwa mereka akan lebih aktif dalam pengamanan di Tangguh, mencuplik peraturan yang mengatur tanggung jawab bagi kepolisian untuk mengelola keamanan obyek-obyek nasional yang vital.<sup>57</sup> Kapolda yang baru sadar akan perjanjian antara Tangguh dan kepolisian Papua (“JUKLAP/PAMBERS”), yang diubah dan diperpanjang pada tahun 2014 hingga 2019 dan yang menerapkan hubungan pengamanan antara Tangguh dan polisi. Akan tetapi, tidak jelas apakah Kapolda yang baru melihat dirinya sebagai pihak dalam perjanjian ini, karena perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kapolda provinsi Papua. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa Kapolda dapat melakukan perubahan pada JUKLAP/PAMBERS sebelum berakhir pada tahun 2019.<sup>58</sup>

JUKLAP/PAMBERS adalah fundamental bagi pengaturan ICBS. JUKLAP/PAMBERS menerapkan bagi Tangguh suatu Nota Kesepahaman (“MOU”) umum antara SKKMigas dan Kepolisian Negara mengenai keamanan bagi fasilitas minyak dan gas. JUKLAP ini mengatur peran kepolisian dalam menanggapi keadaan darurat keamanan; memasukkan Prinsip-prinsip Sukarela terhadap Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia; mewajibkan pelatihan tentang hak-hak asasi manusia bagi semua personel keamanan, termasuk polisi, yang berpotensi terlibat dalam pengamanan Tangguh; mengatur tentang pelaksanaan pelatihan bersama tahunan.<sup>59</sup> Adalah penting agar perjanjian ini terus berlaku hingga akhir jangka waktunya, bila memungkinkan. BP harus mengomunikasikan hal ini kepada Kapolda dan mendorong dilanjutkannya perjanjian yang ada saat ini. Bila perlu, BP harus mendaftarkan dukungan dari SKKMigas, Kapolda di provinsi Papua (yang secara penuh mendukung ICBS dan perjanjian, dan merupakan Kapolda pertama di Papua Barat) dan lainnya untuk mempertahankan JUKLAP/PAMBERS hingga tahun 2019.

Wakil Kapolda mengusulkan perlunya melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Tangguh. Komunikasi yang lebih intensif dengan Kapolda yang baru sangat diharapkan, dan TIAP mendukung usulan ini. Akan tetapi, juga diusulkan agar polisi mendapatkan akses yang lebih besar ke lapangan LNG untuk tujuan intelijen, meningkatkan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial korporat (“CSR”) setempat mereka, dan mendirikan pos polisi di masing-masing desa di Teluk Bintuni. Tindakan ini dapat bertentangan dengan

---

<sup>57</sup> Keppres 63/2004 (tentang Perlindungan Terhadap Aset Nasional yang Vital). Tangguh tidak diakui sebagai aset nasional yang vital hingga tahun 2012, Kepmen 3407/2012.

<sup>58</sup> Tidak ada usul dari kapolres di Bintuni, yang senang dengan penerapan ICBS, termasuk pelatihan tentang hak-hak asasi manusia dan latihan tahunan bersama.

<sup>59</sup> Lihat laporan TIAP Januari 2011 halaman 15-18.

prinsip-prinsip ICBS, dan berpotensi untuk menciptakan ketegangan dan instabilitas di sekitar Tangguh. BP harus memberikan akses yang wajar dan, bilamana diminta, menjadwalkan kunjungan oleh Kapolda dan pejabat-pejabat kepolisian lain ke Tangguh, namun harus menolak setiap kehadiran tetap polisi di lapangan LNG atau desa-desa di sekitarnya. Fokus BP haruslah pada familiarisasi dan implementasi prinsip-prinsip ICBS dari JUKLAP/PAMBERS, termasuk ketiga lingkaran pengamanan, pelatihan tentang hak-hak asasi manusia bagi seluruh staff keamanan swasta dan polisi yang mungkin dipanggil dan pelatihan tahunan dengan partisipasi penuh dari kepolisian.

Potensi risiko kedua terhadap ICBS datang dari TNI, yang mengindikasikan perlunya mendirikan sebuah Kodam baru, atau komando provinsi, di Papua Barat. Hingga kepolisian mendirikan sebuah komando regional di Manokwari, hal ini tampak bukan menjadi prioritas. Sekarang, TIAP diberitahu bahwa sebuah Kodam baru akan didirikan di Manokwari, dan sebuah Kodim, atau komando distrik, di Bintuni pada tahun 2016. Kodam baru tersebut akan memiliki sekitar 7.000 pasukan yang ditempatkan di provinsi Papua Barat. Selain itu, ada rencana untuk menempatkan sebuah unit anti pesawat di Teluk Bintuni, dan Angkatan Laut telah mengambil langkah-langkah untuk mendirikan sebuah markas angkatan laut di Sorong.<sup>60</sup>

Rencana-rencana ini tidak memberikan ancaman saat ini, namun merupakan penyebab kekhawatiran dalam jangka panjang. TNI sudah secara aktif mempromosikan kesediaannya untuk layanan masyarakat dan bentuk kekuasaan “halus” lainnya di Papua. Kepala Pangdam menekankan perlunya memberikan dukungan keamanan yang tepat bagi Tangguh sebagai aset nasional yang vital, dan menyebutkan kemungkinan ancaman terhadap Tangguh dari organisasi-organisasi separatis. Jadi, jika sumber daya tersedia, TNI dapat meningkatkan kehadirannya di Papua Barat dan Teluk Bintuni, dan dapat meminta peran yang lebih besar dalam pengamanan Tangguh. (TNI bukan merupakan pihak dalam perjanjian JUKLAP/PAMBERS dan tidak, pada saat ini, memiliki tanggung jawab langsung atas keamanan pada aset nasional yang vital).<sup>61</sup> Pada saat ini, TNI sudah puas dengan pelatihan bersama tahunan dan yakin bahwa hubungan dengan Tangguh baik. BP tidak dapat secara langsung memengaruhi keputusan penempatan TNI. Namun ia dapat berusaha untuk meyakinkan bahwa TNI dan pihak lain dalam keamanan publik menyadari akan adanya ICBS, mekanismenya dan efektivitasnya sebagai suatu model.

---

<sup>60</sup> Lihat “Nation to Add More Navy Bases,” Republica, 24 Des. 2014.

<sup>61</sup> Ada pembicaraan di Jakarta untuk mengubah tanggung jawab untuk keamanan mengenai aset nasional yang vital dan mengembalikan TNI ke peran yang lebih utama.

Jika dan ketika komando TNI yang baru dibentuk di Papua Barat atau Teluk Bintuni, komunikasi dan edukasi dengan para pemimpinnya harus menjadi prioritas BP.

Kekhawatiran ketiga mengenai keamanan yang ada saat ini datang dari usulan BIN, Badan Intelijen Negara. Anggota senior BIN tidak senang dengan akses keamanan publik ke Tangguh dan komunikasi dengan BP. BIN melihat kebutuhan akan intelijen yang lebih besar dan deteksi dini terhadap potensi keresahan, dengan menyebutkan model Freeport sebagai cara untuk menghindari konflik. Sengketa yang berkelanjutan mengenai ganti rugi<sup>62</sup> adat disebut sebagai sumber kemarahan setempat dan merupakan potensi ancaman bagi Tangguh.

Menyangkut kepolisian dan TNI, arah BP yang terbaik saat ini adalah komunikasi yang lebih baik dan akses yang wajar dan terkendali ke lapangan LNG. BIN tidak begitu mengetahui tentang keberhasilan program sosial BP dan posisi dukungan pada umumnya dari kebanyakan Masyarakat Asli. BIN harus diundang untuk mengamati pelaksanaan pelatihan bersama tahunan dan untuk mengunjungi Tangguh untuk melihat pengaturan keamanan swasta; komunikasi secara reguler harus dilakukan. Akan tetapi, setiap permohonan kepada BP untuk mendukung kegiatan intel reguler atau tetap di lapangan LNG atau di desa-desa sekitarnya perlu dipertimbangkan untuk tidak diterima.

Mengenai para pejabat di semua lembaga keamanan publik, kelihatannya para pejabat keamanan yang baru diangkat tidak begitu mengetahui tentang ICBS. Jadi, komunikasi awal dengan para pejabat yang baru diangkat adalah penting. Hal ini, dan komunikasi yang berkelanjutan, dengan para pejabat ini perlu memperjelas bahwa ICBS bukan hanya menyangkut keamanan eksternal, namun ia mempunyai ruang lingkup yang lebih luas tentang penyatuan pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat di sekitar area Proyek berdasarkan saling menghormati, terutama hormat terhadap budaya setempat.

Ancaman terpisah terhadap kedamaian dan ketenteraman di Teluk Bintuni datang dari praktik-praktik perusahaan minyak dan gas yang mengeksplorasi, dan berpotensi memproduksi, sumber daya dari area tersebut, yang paling signifikan adalah Genting Oil. Genting telah melakukan eksplorasi dan produksi (“E&P”) di dekat Tangguh selama beberapa tahun, dan telah menemukan cadangan gas di dalam batas area. Genting telah menggunakan tentara TNI yang sudah tidak aktif untuk pengamanannya, menempatkan mereka sedekat mungkin ke Tangguh

---

<sup>62</sup> Lihat Bagian II di atas.



seperti Tanah Merah Baru (desa pemukiman kembali).<sup>63</sup> TIAP dan BP mengemukakan kekhawatiran mengenai pemakaian pasukan militer oleh Genting sebelumnya, dan kemudian dilakukan perubahan. Akan tetapi, mengingat kedekatannya dengan Tangguh (sekarang Genting telah membangun sebuah jalan sepanjang 16 km berbatasan dengan garis keliling lapangan LNG), dan penggunaan pasukan keamanannya, setiap insiden yang disebabkan oleh personel keamanan Genting pasti akan memengaruhi BP/Tangguh. TIAP mengemukakan kekhawatiran ini kepada para pejabat setempat dan nasional, meminta mereka untuk mendorong Genting menggunakan model ICBS untuk pengamanan. Tidak jelas apakah permintaan ini akan efektif. BP harus berhubungan secara langsung dengan Genting menyangkut hal ini, menawarkan untuk berbagi pengalamannya dengan ICBS dan mengundang para pejabat keamanan Genting untuk mengamati pelaksanaan pelatihan bersama tahunan; BP juga harus terus meminta SKKMigas dan pihak lain untuk mendorong Genting agar tidak menggunakan TNI atau polisi untuk pengamanan lapangan.

#### **Rekomendasi: Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia**

- 1. BP harus mempertahankan ICBS, dan berupaya meneruskan perjanjian JUKLAP/PAMBERS dengan polisi selama jangka waktunya saat ini. Bila perlu, BP harus meminta dukungan dari SKKMigas, Kapolda di provinsi Papua dan lainnya untuk mempertahankan JUKLAP/PAMBERS hingga tahun 2019.**
- 2. BP harus memberikan akses yang wajar dan, bila diminta, menjadwalkan kunjungan oleh Kapolda dan pejabat kepolisian lain ke Tangguh, namun harus menolak setiap kehadiran tetap polisi di lapangan LNG atau desa-desa di sekitarnya.**
- 3. Fokus BP dengan komando kepolisian yang baru haruslah pada familiarisasi dan implementasi prinsip-prinsip ICBS dari JUKLAP/PAMBERS, termasuk ketiga lingkaran pengamanan, pelatihan tentang hak-hak asasi manusia bagi seluruh staf keamanan swasta dan polisi yang mungkin dipanggil dan pelatihan tahunan dengan partisipasi penuh kepolisian.**
- 4. Jika dan ketika komando TNI yang baru dibentuk di Papua Barat atau Teluk Bintuni, komunikasi dan edukasi dengan para pimpinannya mengenai ICBS harus menjadi prioritas BP.**

---

<sup>63</sup> Lihat laporan TIAP Oktober 2012 halaman 15.

5. **Komunikasi berkala harus diadakan dengan BIN, yang harus diundang untuk mengamati pelaksanaan pelatihan bersama tahunan dan untuk mengunjungi Tangguh. Akan tetapi, setiap permohonan kepada BP untuk mendukung kegiatan intel reguler atau tetap di lapangan LNG atau di desa-desa sekitarnya perlu dipertimbangkan untuk tidak diterima.**
6. **BP harus juga menekankan dalam komunikasinya dengan pemangku kepentingan eksternal, terutama dengan pejabat keamanan publik, bahwa bagian penting dari ICBS adalah menjaga hubungan baik dengan masyarakat di sekitar proyek berdasarkan saling menghormati.**
7. **BP harus menggunakan Genting secara langsung menyangkut pengaturan keamanan, menawarkan untuk berbagi pengalamannya dengan ICBS dan mengundang para pejabat keamanan Genting untuk mengamati pelaksanaan pelatihan tahunan; BP juga harus terus meminta SKKMigas dan pihak lain untuk mendorong Genting agar tidak menggunakan TNI atau polisi untuk pengamanan lapangan.**

## V. Program Sosial dan Ekonomi untuk Pembangunan Papua

### A. Listrik dan Daya untuk Papua Barat

Kebanyakan dari dukungan setempat untuk Tangguh terkait dengan pemasangan listrik untuk kota Bintuni dan desa-desa tertentu di sekitar Teluk Bintuni, serta harapan agar hal tersebut akan segera diperluas ke bagian lain kabupaten tersebut. Dukungan di antara para pimpinan provinsi datang sebagian dari keyakinan bahwa LNG dari Tangguh pada akhirnya akan memberi daya pada pembangkit listrik yang lebih andal dan murah di seluruh Papua Barat.<sup>64</sup> Manfaat sosial dan ekonomi derivatif dari daya listrik yang andal tidak dapat dinyatakan secara berlebihan dan sudah lama menjadi prioritas TIAP.<sup>65</sup> Namun hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam pemasangan listrik setempat sejak kunjungan TIAP 18 bulan yang lalu.<sup>66</sup> Ini mungkin sebagian besar akibat dari tidak adanya tindakan oleh pihak lain, namun BP tidak boleh merasa puas dengan penundaan terus-menerus yang mungkin merupakan kesalahan pihak lain. Sebaliknya, BP harus mengambil langkah apa pun yang dapat ia lakukan untuk memperluas area yang mendapatkan listrik secara sistematis sehingga kemajuan tidak tertunda.

Terdapat beberapa desa di mana infrastruktur untuk listrik telah dipasang, namun tidak ada listrik yang disediakan.<sup>67</sup> Berkoordinasi dengan SKKMigas, yang mendukung upaya BP untuk meningkatkan manfaat bagi Masyarakat Asli, BP harus bekerjasama dengan PLN untuk mengembangkan jadwal bertahap untuk memperluas jangkauan listrik ke setiap desa di mana infrastruktur telah tersedia. Di area-area di mana PLN masih harus membangun *grid*, misalnya di Babo, Tofoi dan desa-desa tertentu di pesisir pantai utara, BP harus bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan kapasitas pembangkit diesel sehingga, paling tidak, fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas dapat mengandalkan tenaga listrik yang cukup dan berkelanjutan.

Ini khususnya penting bagi puskesmas ketika mereka menangani keadaan darurat untuk melahirkan dan membutuhkan peralatan tertentu untuk ibu dan bayi. Perlu juga dicatat bahwa sementara rumah sakit Bintuni mempunyai listrik, generator daruratnya menggunakan engkol yang dapat membutuhkan waktu 20 menit untuk menghidupkannya dalam situasi darurat. Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi bayi di unit neonatologi yang

---

<sup>64</sup> Lihat Bagian II di atas.

<sup>65</sup> Lihat, misalnya, laporan TIAP Maret 2007 halaman 25 dan laporan TIAP Mei 2014 halaman 30-31.

<sup>66</sup> Sub-gardu listrik yang menghubungkan Tangguh ke *grid* sampai dengan 8MW selesai pada Januari 2013.

<sup>67</sup> Ini termasuk Onar, Tambanewa, Pera-pera, Sorandauni dan Aranday.

menggunakan ventilasi dan peralatan keselamatan jiwa lainnya. Untuk menjamin keselamatan pasien, penting bagi rumah sakit untuk mendapatkan bantuan dalam mendapatkan tombol transfer manual untuk generator mereka, yang akan memungkinkan generator mereka dihidupkan dalam waktu kurang dari 30 detik.

Secara terpisah, para pimpinan daerah melihat manfaat besar yang mengalir dari gas Tangguh ke program ketenagalistrikan. BP telah berkomitmen dalam AMDAL baru untuk mengalokasikan sampai dengan 20 mmcf/hari (atau 0,16 mtpa) dari LNG untuk pembangkit tenaga listrik di provinsi Papua Barat. Gubernur Atururi telah mendukung ide ini selama beberapa tahun, dan hal ini telah didukung oleh TIAP. Secara hukum, ini baru akan menjadi kewajiban jika Kilang 3 dibangun.

Ada banyak rintangan yang perlu diatasi, namun penting agar program ini dilanjutkan apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun depan atau tidak. Program ini sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi Papua dan posisi Tangguh di Papua untuk bergantung pada pengembangan. Untungnya, banyak yang dapat dicapai secara teknis sebelum pembangunan Kilang 3, termasuk pengujian tentang keselamatan dan kelayakan tanker mini-LNG yang akan digunakan untuk membongkar dan mengangkut LNG dari supertanker yang saat ini dimuat di Tangguh, tanpa memerlukan dermaga baru di Tangguh. Sudah tentu sistem ini tidak dapat berfungsi hingga fasilitas penerima LNG dan konversi pembangkit tenaga listrik dibangun di masing-masing kota menggunakan LNG.<sup>68</sup>

Halangan awal pada dasarnya adalah masalah hukum/struktural, terkait dengan kebutuhan untuk mendirikan sebuah perusahaan daerah (“BUMD”) yang memenuhi syarat untuk membeli LNG.<sup>69</sup> Semua pihak tampak mendukung, dan BP hanya bisa mempunyai peran terbatas dalam aspek ini. BP sedang bekerja, dan harus terus bekerjasama dengan SKKMigas, ESDM dan mitra regionalnya untuk memastikan bahwa LNG dapat disediakan segera setelah memungkinkan secara teknis dan hukum; dan harus memberikan atau mensponsori dukungan teknis untuk mempercepat pembangunan ini.

---

<sup>68</sup> LNG akan dipakai untuk pembangkit tenaga listrik saja. Diusulkan oleh Deputi Direktur Jenderal Minyak dan Gas agar LNG juga dipasok untuk “gas kota,” (yaitu, untuk didistribusikan ke perumahan dan pelanggan komersial). Memang ini ide yang bagus untuk jangka panjang, akan tetapi banyak infrastruktur perlu dibangun terlebih dahulu.

<sup>69</sup> Tidak jelas mengapa pembeli tidak boleh PLN, yang telah mengemukakan minat sebelumnya dan, dalam hal apa pun, merupakan pembeli akhir dan pemilik dari fasilitas pembangkit.

## **Rekomendasi: Listrik dan Daya**

- 1. Berkoordinasi dengan SKKMigas, BP harus bekerjasama dengan PLN untuk mengembangkan suatu jadwal bertahap untuk memperluas jangkauan listrik ke setiap desa di mana infrastruktur sudah tersedia.**
- 2. Di area-area di mana PLN masih harus membangun *grid*, BP harus bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk meningkatkan kapasitas pembangkit diesel sehingga, paling tidak, fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas dapat mengandalkan tenaga listrik yang cukup dan berkelanjutan.**
- 3. BP harus bekerjasama dengan SKKMigas, ESDM dan mitra regionalnya untuk memastikan bahwa LNG dapat disediakan bagi tenaga listrik Papua segera setelah dapat dilakukan secara teknis dan hukum;**

### **B. Perumahan di Pesisir Pantai Utara**

Restorasi perumahan pesisir pantai utara telah menjadi isu yang diperdebatkan dan menjadi sumber kecemburuan sejak pembangunan desa-desa pemukiman kembali pada pesisir pantai selatan dimulai tahun 2005. TIAP sudah lama meminta BP untuk menangani keluhan ini; dan BP telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan hal itu, namun semuanya gagal.<sup>70</sup> Rekonstruksi perumahan tertentu di pesisir pantai utara sekarang merupakan komitmen utama dalam AMDAL ekspansi Tangguh. Secara hukum, tidak terdapat kewajiban hingga pengembangan Tangguh pada akhirnya disetujui. Akan tetapi, sebelum izin final, BP sedang mendukung pekerjaan awal untuk perbaikan infrastruktur dan desain rumah untuk Distrik Weriagas dan Tomu yang akan memberikan perlindungan dari infiltrasi pantai dan sungai pada lingkungan hidrologis yang menantang. Kendati desa-desa ini menghadapi ancaman berat dari naiknya permukaan laut, Masyarakat Asli dan perwakilan yang mereka pilih telah memilih untuk melakukan restorasi ketimbang relokasi. Berdasarkan sensus sosial-ekonomi yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (“UGM”), 456 rumah akan dibangun untuk dua distrik ini. Walaupun mahal karena sulitnya lokasi, berdasarkan AMDAL pilihan itu harus dilakukan.

Akan tetapi, komitmen BP terhadap perubahan pesisir pantai utara tidak boleh sepenuhnya bergantung pada izin akhir atau dimulainya pembangunan Kilang 3. Komitmen

---

<sup>70</sup> Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 28-30 untuk ringkasan.

untuk menangani isu ini di antara desa-desa pesisir pantai utara sudah lama, jauh sebelum ada pembicaraan tentang Kilang 3. Sangat diharapkan agar program ini akan dimulai tahun 2016. Akan ada Bupati baru di tahun 2016 dan banyak dari program ini bergantung pada tindakan dari pemerintah setempat. BP harus mencari dukungan dari SKKMigas dan Bupati yang baru untuk memulai program ini pada tahun 2016, jika perlu, kendati jika izin akhir pengembangan Tangguh ditunda. BP juga harus memikirkan untuk memperluas program ini, di waktu yang akan datang, ke desa-desa di pesisir pantai utara lainnya. Atas persetujuan SKKMigas, harus dijelaskan kepada Bupati yang baru bahwa BP akan bekerjasama dengan Bupati dan memberikan bantuan teknis untuk mendukung restorasi perumahan pesisir pantai utara secepat mungkin.

### **Rekomendasi: Perumahan di Pesisir Pantai Utara**

**BP juga harus meminta dukungan dari SKKMigas dan Bupati yang baru untuk memulai program restorasi perumahan di pesisir pantai utara pada tahun 2016, jika perlu, kendati jika izin akhir pengembangan Tangguh ditunda. BP juga harus memikirkan untuk memperluas program ini, di waktu yang akan datang, ke desa-desa di pesisir pantai utara lainnya.**

## **C. Perekrutan, Retensi dan Promosi Orang Papua di Tangguh**

### **1. Perekrutan**

Salah satu komitmen AMDAL paling fundamental BP adalah untuk membangun sumber daya manusia Papua dalam waktu 20 tahun sehingga orang Papua kemudian bisa menjalankan sebagian besar Tangguh. Sebelum tahun 2019, BP dan para kontraktornya harus mempekerjakan 100% orang Papua dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan tinggi, dan paling sedikit 78% pada pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi dan 33% pada posisi penyelia. Bagi para pimpinan di Papua, hasil ini selalu dianggap sebagai warisan dan kontribusi tetap Tangguh bagi orang Papua. BP telah secara serius membuat komitmen ini, berfokus pada isu sejak permulaan dan membuat perubahan berulang kali yang dirancang untuk meningkatkan hasil.<sup>71</sup> Kemajuan yang signifikan telah dicapai, namun sekarang telah tampak bahwa upaya tambahan diperlukan untuk mencapai sasaran ini.

---

<sup>71</sup> Lihat laporan TIAP Maret 2007 halaman 15-16, laporan Maret 2008 halaman 10-11, laporan Oktober 2012 halaman 31-35, dan laporan Mei 2014 halaman 38-41.

Tingkat perekrutan orang Papua secara keseluruhan telah tertahan pada angka 54% dari jumlah tenaga kerja. Sementara 54% dan lebih dapat direkomendasikan pada tahun 2011, tingkat tersebut pada tahun 2015 memperlihatkan hambatan yang serius. Yang paling serius adalah kesulitan untuk mempromosikan orang Papua ke tingkat yang memerlukan keterampilan, manajer dan penyelia, khususnya Masyarakat Asli (“IP”). IP mewakili hanya 1% dari posisi ini pada tahun 2015. Orang Papua lainnya<sup>72</sup> mewakili persentase yang lebih besar, sehingga mencapai total sekitar 30% pekerja yang mempunyai keterampilan dan 23% manajer/penyelia. Tingkat ini harus dinaikkan masing-masing menjadi 78% dan 35%, sebelum tahun 2029. Meskipun tahun 2029 kelihatan masih jauh, ini bukanlah waktu yang lama mengingat lini waktu yang lama yang diperlukan untuk merekrut, mengembangkan dan mempromosikan cukup orang Papua untuk memenuhi komitmen AMDAL. Diperlukan perubahan menyangkut proses perekrutan dan pengembangan karyawan Papua.

Perekrutan orang Papua yang memenuhi syarat secara teknis adalah sulit, baik bagi BP maupun para kontraktornya. Terdapat jumlah terbatas lulusan sekolah tinggi dan lembaga teknik, (“politeknik”), dan bahkan lulusan sekolah menengah atas yang memenuhi syarat. Upaya-upaya sebelumnya untuk meningkatkan jumlah ini telah menghasilkan kemajuan, namun belum menyediakan jumlah pelamar yang akan memenuhi peningkatan tenaga kerja terampil Papua yang diperlukan. BP sedang mengambil langkah-langkah baru untuk menangani masalah ini.

Yang paling signifikan, BP sedang mendukung Politeknik Fakfak yang baru, yang menghasilkan lulusan pertamanya sebanyak 54 orang pada bulan September. Orang-orang muda Papua telah dilatih secara teknis dalam teknik mesin dan teknik sipil serta keterampilan ilmu komputer. BP sedang berusaha untuk mempekerjakan sekitar 40 orang dari lulusan ini dari Fakfak dan sekolah-sekolah lain setiap tahun untuk program magang teknisnya. BP juga bekerjasama dengan UNIPA dan kabupaten lain, seperti Manokwari, untuk membangun tambahan politeknik di wilayah ini.

Sudah lama BP kesulitan untuk memaksakan target mempekerjakan dan mempromosikan orang Papua kepada para kontraktornya.<sup>73</sup> Ini sebagian karena terbatasnya jangka waktu kontrak. Sebagai respons terhadap masalah itu, BP sedang mempertimbangkan

---

<sup>72</sup> Orang Papua lainnya yang mewakili separuh Papua atau telah tinggal di Papua dalam waktu yang cukup lama. Keterangan lengkap mengenai klasifikasi orang Papua terdapat dalam laporan TIAP Mei 2014 halaman 41.

<sup>73</sup> Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 40-41.

suatu rencana untuk secara bertahap mengerjakan lebih banyak dari kegiatan-kegiatan ini sendiri, sebagai kegiatan inti menggunakan karyawan BP. Jika rencana ini dilaksanakan, BP akan mempunyai kendali lebih banyak terhadap pemberian kerja dan promosi orang Papua untuk fungsi-fungsi yang saat ini dikontrakkan ke pihak lain, misalnya pemeliharaan. TIAP mendorong respons ini, karena upaya-upaya lain telah gagal.

Secara terpisah, BP sedang mendukung suatu fasilitas pelatihan tukang las di Bintuni, suatu ide yang diusulkan oleh Bupati kepada SKKMigas. Para lulusannya dapat dipekerjakan oleh Tangguh, atau pihak lain. Tidak jelas apakah hal ini akan segera berhasil, mengingat pengalaman dari fasilitas pelatihan kejuruan di Aranday yang dikembangkan oleh BP untuk meningkatkan keterampilan para penduduk desa pesisir pantai utara. Namun pengelasan adalah suatu profesi yang banyak dibutuhkan, bukan saja di Tangguh, dan Bintuni adalah masyarakat yang jauh lebih besar daripada Aranday. Selain itu, BP juga akan terus mendukung beasiswa universitas bagi murid-murid Papua, magang di Tangguh dan program *Challenger*-nya bagi murid paling berprestasi, yang sekarang akan difokuskan pada orang Papua.<sup>74</sup>

Ini semua merupakan prakarsa yang baik, dan bersama-sama, bila dikejar secara agresif, maka akan memberi hasil. Namun dua unsur lain adalah penting untuk menjamin keberhasilan. Pertama, program perekrutan perlu menjadi tanggung jawab utama manajer senior, jika memungkinkan, seseorang yang dapat diharapkan untuk tinggal di Indonesia dan mengelola program itu lebih dari beberapa tahun. Kedua, metrik interim harus dibuat, paling tidak secara tahunan, untuk mengukur kemajuan dari setiap komponen dan untuk melakukan penyesuaian apabila target tidak dicapai. Misalnya, BP dapat meningkatkan pool pemasok teknisi jika diperlukan calon pada tingkat awal atau menyediakan lebih banyak beasiswa untuk orang Papua jika program tersebut memberikan hasil yang lebih baik.

## **2. Promosi**

Pertumbuhan keterampilan karyawan Papua di Tangguh adalah elemen penting lainnya dalam mengembangkan para manajer dan penyelia Papua. Mungkin ini menjadi tugas yang lebih sulit; sementara preferensi orang Papua (aksi afirmatif) dapat dipraktikkan dalam perekrutan, meritokrasi mutlak harus menjadi aturan untuk promosi. Jadi, penting agar karyawan Papua diberikan pelatihan (termasuk kelas-kelas bahasa Inggris yang perlu), dukungan manajemen dan umpan balik yang memungkinkan mereka untuk naik ke tingkat lebih

---

<sup>74</sup> Lihat, misalnya laporan TIAP Mei 2014 untuk keterangan yang lebih lengkap dari program-program ini.



tinggi. Ini juga merupakan sumber dari banyak pembahasan TIAP dan beberapa prakarsa BP sebelumnya.<sup>75</sup> Namun, seperti halnya perekrutan, program ini perlu diperkuat jika keberhasilan ingin dipastikan.

Dalam pertemuannya dengan para karyawan Papua, TIAP mempelajari banyak contoh di mana kebijakan yang bertujuan baik dari jajaran atas tidak diterjemahkan ke dalam hasil yang efektif pada jajaran bawah. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan dukungan. Seluruh karyawan BP harus tahu bahwa memiliki sponsor atau mentor dan pembimbing teknis adalah penting untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Juga penting adalah mempunyai manajer langsung yang mempunyai keinginan untuk mendukung pekerja Papua mereka. Hal ini khususnya diperlukan bagi Masyarakat Asli, yang kebanyakan tidak fasih berbahasa Inggris, dan tidak terbiasa dengan tuntutan-tuntutan dari suatu perusahaan industri besar.<sup>76</sup> Sulit untuk menanamkan kepada para manajer menengah suatu komitmen untuk pengembangan karyawan Papua. Namun jika hal ini bisa efektif, inisiatif harus datang dari pimpinan atas, dan kepentingannya harus dikomunikasikan.

TIAP mengajurkan tiga perubahan dalam Program Pengembangan SDM Papua. Pertama, keberhasilan program ini harus menjadi tanggung jawab pejabat tingkat tinggi BP, kemungkinan Vice President Sumber Daya Manusia atau manajer lapangan untuk Tangguh. Metriks khusus harus dipakai untuk mengukur kinerja, dan manajemen senior harus bertanggung jawab.

Kedua, para manajer harus lebih berkomitmen pada program ini. Semua manajer senior harus diwajibkan untuk menjadi mentor atau pelatih teknis bagi orang Papua. Semua manajer yang lain harus didorong untuk melakukan hal itu, dan diberi penghargaan untuk melakukan hal itu secara efektif. Satu indikator kinerja kunci untuk semua manajer adalah keberhasilan pengembangan karyawan Papua dalam tim mereka. Ini juga akan memerlukan koordinasi yang lebih kuat di antara manajer menyangkut anggota tim secara individu yang memiliki banyak manajer, karena perubahan *shift* yang berbeda. Upaya ini harus dipimpin dan ditegakkan dari

---

<sup>75</sup> TIAP telah mengangkat hal ini sebelumnya, walaupun dalam laporannya bulan Mei 2014, TIAP terutama mengangkat isu perekrutan. Lihat, selanjutnya, laporan TIAP Maret 2012 halaman 33-35 dan laporan Januari 2011 halaman 20-21.

<sup>76</sup> Dengan dukungan kuat TIAP, BP melanjutkan programnya dalam pelatihan bahasa Inggris untuk karyawan di luar shift di Manokwari, Sorong dan Jayapura. Ini adalah sesuatu yang dapat diusulkan oleh para manajer kepada karyawan bila mereka yakin bahwa keterampilan bahasa Inggris yang lebih baik akan bermanfaat dalam pengembangan karier. Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 39-40.

atas, dan dikomunikasikan sebagai suatu hal penting bagi BP.

Ketiga, komunikasi manajemen senior dengan karyawan Papua harus ditingkatkan dan dilakukan secara berkala. Karyawan Papua mempunyai sangat sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan manajemen, dimana mereka dapat memberikan usulan yang bermanfaat atau mengutarakan keluhan-keluhan menyangkut keadaan mereka. Meningkatkan interaksi ini, baik melalui suatu komite perwakilan orang Papua atau penentuan suatu waktu yang sudah diatur sebelumnya di mana manajemen tersedia untuk bertemu dengan semua pegawai Papua, akan membantu meningkatkan pemahaman dan menghilangkan rintangan-rintangan terhadap perkembangan mereka.

BP sudah memulai menerapkan sebagian dari rekomendasi ini, termasuk sebuah program untuk mendukung pekerja Papua dengan tambahan pembimbingan dan pengajaran, dan dialog langsung dan berkala antara manajemen senior dan pekerja Papua. Ini merupakan perubahan yang disambut baik dan menggembirakan. Keberhasilannya akan bergantung pada komitmen manajemen dalam waktu lama.

#### **Rekomendasi: Pekerjaan Bagi Orang Papua**

- 1. Perekrutan orang Papua perlu menjadi tanggung jawab utama manajer senior. Selain itu, metriks interim harus dibuat, paling tidak secara tahunan, untuk mengukur kemajuan dari setiap komponen dan untuk melakukan penyesuaian apabila target tidak dicapai.**
- 2. Retensi dan promosi karyawan Papua juga harus menjadi tanggung jawab pejabat tingkat tinggi BP, kemungkinan Vice President Sumber Daya Manusia atau manajer lapangan untuk Tangguh. Metriks khusus harus dipakai untuk mengukur kinerja, dan manajemen senior harus bertanggung jawab. Semua manajer senior harus diwajibkan untuk menjadi mentor atau pelatih teknis bagi orang Papua. Semua manajer yang lain harus didorong untuk melakukan hal itu, dan diberi penghargaan untuk melakukan hal itu secara efektif.**
- 3. Komunikasi manajemen dengan karyawan Papua harus ditingkatkan dan dilakukan secara berkala. Para pekerja Papua di Tangguh, atau grup perwakilan yang ditunjuk, harus bertemu secara berkala dengan manajer senior BP yang bertanggung jawab atas retensi dan promosi orang Papua.**

4. **Sepanjang memungkinkan, karyawan Papua dari kontraktor utama yang bekerja di Tangguh juga harus diikutsertakan dalam komunikasi ini untuk memberikan kepada BP pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan-kesulitan yang ditemui para kontraktor dalam penerapan program retensi dan promosi orang Papua.**

#### **D. Pemeliharaan Kesehatan**

Sebelumnya TIAP telah mengemukakan tentang keberhasilan yang signifikan dari program kesehatan BP di Teluk Bintuni, pertama dengan Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh (“TCHU”) di DAV<sup>77</sup> dan baru-baru ini dengan dukungan yang lebih luas untuk Yayasan Sosial Augustinus (“YSA”), dalam mendorong peningkatan pemeliharaan kesehatan di seluruh kabupaten.<sup>78</sup> Pada bulan Mei 2015, program pengendalian malaria di Teluk Bintuni diakui secara nasional, memenangkan Penghargaan Inovasi dalam Layanan Publik atas keberhasilannya dalam menghapuskan sebagian besar malaria dari DAV, yang diberikan kepada Bupati oleh Vice President. Sasaran YSA adalah menghapuskan malaria secara keseluruhan dari Teluk Bintuni sebelum tahun 2021.

Bupati, yang adalah seorang yang berpendidikan dokter gigi, telah memprioritaskan pendanaan dan fasilitas untuk perawatan gigi. Rumah sakit pertama di Teluk Bintuni, salah satu dari pencapaiannya yang terkenal, sudah mempunyai peningkatan layanan, termasuk operasi, fasilitas darurat dan sebuah unit neonatologi. Rumah sakit ini memiliki suatu tim yang berdedikasi dan antusias, dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit dan kepala dinas kesehatan Teluk Bintuni, dengan rencana untuk pengembangan selanjutnya dalam kesehatan publik dalam pencegahan dan perawatan TB dan HIV di desa-desa, serta peningkatan kapasitas rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan. Para profesional medis ini senang dengan dukungan dari BP.

Kapasitas untuk kesehatan ibu dan anak, area yang menjadi fokus TIAP tahun 2014, telah menunjukkan peningkatan material. Dengan dukungan BP, puskesmas Babo sekarang memiliki program untuk perempuan dan anak berisiko tinggi di pesisir pantai selatan. BP juga mendukung program Puskesmas serupa yang segera akan berfungsi di pesisir pantai utara Aranday dan di Kokas Fakfak sebelum tahun 2018. Layanan ambulans air sekarang sudah tersedia untuk mengantar ibu-ibu yang berisiko tinggi dari Babo ke Bintuni. Secara terpisah,

---

<sup>77</sup> Lihat laporan TIAP Maret 2009 halaman 33-34, 64-65 dan laporan Maret 2008 halaman 28-29.

<sup>78</sup> Lihat laporan TIAP Mei 2014 halaman 31-32.

namun juga penting, tim Kesehatan sedang berupaya untuk memperluas program air bersih/sanitasi dan mendorong perubahan perilaku di luar DAV kepada masyarakat yang lebih luas.

Kemitraan BP dengan Bupati mengenai layanan pemeliharaan kesehatan telah mencapai hasil yang diakui secara nasional. Namun demikian, masih banyak yang perlu dilakukan berhubung pemeliharaan kesehatan dan air bersih di Teluk Bintuni masih sangat terkebelakang dibandingkan dengan banyak tempat lain di negara ini. Dukungan BP untuk kapasitas dinas kesehatan kabupaten, dan dukungannya yang berkelanjutan bagi Puskesmas yang melayani desa-desa di pesisir pantai utara dan selatan, harus diteruskan. Diharapkan, Bupati yang baru akan berkomitmen pada program-program ini. Berhubung Bupati yang baru bukanlah seorang profesional kesehatan, BP harus menjelaskan kepada beliau tentang kesediaannya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemeliharaan kesehatan kabupaten.

### **Rekomendasi: Pemeliharaan Kesehatan**

- 1. BP harus terus mendukung kapasitas dari dinas kesehatan kabupaten, dan bagi puskesmas yang melayani desa-desa di pesisir pantai utara dan selatan. BP harus menjelaskan kepada Bupati yang baru tentang kesediaannya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemeliharaan kesehatan kabupaten.**

### **E. Pendidikan**

BP telah mendukung pendidikan dasar dan menengah di area Teluk Bintuni sejak pembangunan Kilang 1 dan 2.<sup>79</sup> Dukungan ini terutama melalui bantuan kepada para mitra yang memberikan guru untuk DAV dan meningkatkan kapasitas dari departemen pendidikan setempat. BP juga telah memberikan dukungan yang efektif untuk UNIPA di Manokwari<sup>80</sup> (yang telah menyediakan sebagian guru) dan telah memberikan beasiswa kepada murid-murid Papua. Semua tindakan ini telah mempunyai dampak positif, yang paling signifikan dalam meningkatkan keterampilan dasar bagi murid-murid sekolah dasar dan menengah di kabupaten.<sup>81</sup> Akan tetapi, program-program ini belum benar-benar berhasil dalam meningkatkan prestasi dari murid-murid berprestasi di Teluk Bintuni sehingga mereka bisa maju ke tingkat berikutnya. Untuk memenuhi kebutuhan penting ini, BP dan masyarakat setuju untuk

---

<sup>79</sup> Lihat laporan TIAP Maret 2009 halaman 30-31 dan laporan Maret 2007 halaman 22-23.

<sup>80</sup> Lihat Laporan TIAP Mei 2014 halaman 59.

<sup>81</sup> Lihat Laporan TIAP Januari 2011 halaman 23.

mendirikan serangkaian sekolah menengah atas “unggulan”, di mana murid-murid terbaik bisa masuk dan dipersiapkan untuk pendidikan tinggi. TIAP mengusulkan pada awalnya satu sekolah unggulan di pesisir pantai utara dan satu di pesisir pantai selatan, dan mendorong BP untuk segera merealisasikan konsep ini.

Sayangnya, terdapat hanya sedikit kemajuan ke arah sasaran ini dalam waktu 18 bulan sejak kunjungan TIAP terakhir. Sebagian dari tidak adanya tindakan ini adalah akibat dari kegagalan proses tender untuk menggantikan mitra pendidikan BP sebelumnya, British Council. Karena pentingnya dan lamanya waktu yang diperlukan untuk berkembang secara penuh, ini bukanlah suatu program yang dapat ditunda. Kecuali Bupati yang baru dipilih tidak berniat untuk segera melanjutkan, BP harus berupaya untuk mempercepat pendirian sekolah unggulan pertama di Teluk Bintuni sebelum tahun 2019, targetnya saat ini.

### **Rekomendasi: Pendidikan**

- 1. Pendirian sekolah unggulan yang pertama di Teluk Bintuni harus merupakan prioritas pendidikan BP dengan target waktu sebelum tahun 2019.**

### **F. Pengembangan Usaha Masyarakat Asli**

Pengembangan kapasitas bisnis setempat telah menjadi bagian dari komitmen sosial AMDAL Tangguh sejak awal. Multi komponennya mencakup program usaha mikro, pengembangan usaha perempuan, pembangunan kapasitas untuk bisnis regional sehingga mereka bisa menjadi pemasok untuk Tangguh dan pihak lain, dukungan bagi koperasi pertanian dan perikanan dan pengadaan buah-buahan, sayuran, ikan dan udang dari titik penyimpanan setempat.<sup>82</sup> Dukungan BP bagi perusahaan setempat merupakan bagian penting dalam hubungannya dengan wilayah ini. Hal ini bukan saja meningkatkan pendapatan dan mendiversifikasikan pertumbuhan di wilayah, namun juga memperluas manfaat langsung Tangguh kepada kelompok yang lebih luas.

Pengadaan barang dan, pada akhirnya, jasa, memiliki potensi untuk peningkatan yang signifikan, khususnya jika Kilang 3 dilanjutkan. Saat ini, sumber daya lokal memasok sekitar 20% dari produk pertanian segar dan hampir 25% dari produk ikan segar yang dikonsumsi di Tangguh. Sementara mungkin tidak memungkinkan untuk memasok semua buah, sayur, ikan dan udang segar dari sumber lokal kepada ribuan pekerja tambahan, dukungan utama harus

---

<sup>82</sup> Lihat Laporan TIAP Januari 2011 halaman 21 dan laporan Maret 2009 halaman 35-36.

disediakan untuk memfasilitasi peningkatan besar dalam pasokan yang stabil untuk produk-produk ini. AMDAL pengembangan menjanjikan BP untuk mengadakan 10% dari kebutuhan Tangguh selama konstruksi dan 65% pascakontruksi. Apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak, BP sekarang harus mengambil langkah untuk meningkatkan pembelian lokal untuk 65% dari kebutuhannya. Ini sudah merupakan pengembangan perusahaan lokal yang paling berhasil yang dilakukan dan mempunyai banyak ruang untuk berkembang lebih lagi di masa yang akan datang; pengembangannya harus terus menjadi prioritas.

Secara terpisah, peningkatan pembelian untuk barang dan jasa lain dari pemasok lokal sekarang lebih dapat dilakukan sebagai hasil dari perubahan dalam kebijakan pengadaan yang diizinkan. SKKMigas telah mengizinkan kontrak untuk jumlah kurang dari \$20.000 untuk diadakan secara langsung dari sumber-sumber lokal yang memenuhi syarat, tanpa harus melalui tender yang kompetitif. Adalah penting agar pengadaan dan grup Manajemen Rantai Pasokan di Tangguh mengidentifikasi produk dan jasa yang potensial yang memenuhi syarat dan agar hal ini dikomunikasikan secara luas sehingga bisnis Papua dapat berfokus untuk melayani kebutuhan ini.

Untuk mendukung kesempatan bisnis ini, yang dapat melayani Tangguh atau pembeli lain, Program Pembangunan Usaha Masyarakat Asli (“IEDP”) telah membantu mendirikan sebuah Pusat Pengembangan Bisnis (“BDS”). Ini akan mendorong pendirian perusahaan baru di Bintuni, Fakfak, Sorong dan Manokwari. Program ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah dan potensi besar bagi bisnis yang dijalankan oleh IP. TIAP bertemu dengan DBS di Bintuni dan mengunjungi dua dari pendirian perusahaan IP yang pertama: sebuah fasilitas pabrik pakaian (yang dijalankan sepenuhnya oleh perempuan) dan bengkel perbaikan AC. Keduanya menunjukkan profesionalisme dan antusiasme dalam usahanya. Dengan adanya listrik yang dapat diandalkan di Bintuni, perbaikan AC/pendingin (dengan panggilan rumah) akan melayani kebutuhan yang meningkat, dan untuk pakaian seragam Tangguh dan kemungkinan untuk hampir setiap pejabat pemerintah, pabrik pakaian juga akan berkembang dengan subur. Para manajer dan karyawan dari kedua bisnis baru ini, yang disebut SUBITU (Unit Usaha Suku Bintuni Bersatu), memperlihatkan kebanggaan atas pencapaian awalnya, dan mengusulkan kepada TIAP agar BP terus mendukung program ini, yang memiliki potensi untuk banyak perusahaan baru lainnya. Dalam jangka panjang, penting agar perusahaan-perusahaan yang baru didirikan ini bisa dijalankan sepenuhnya oleh IP, tanpa dukungan dari staf atau mitra

BP. Oleh sebab itu, pelatihan dan bimbingan tentang cara mengelola perusahaan-perusahaan ini secara independen oleh IP harus ditekankan di masa yang akan datang.

### **Rekomendasi: Pengembangan Usaha Masyarakat Asli**

- 1. BP harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya beli pertanian dan perikanan lokal hingga 65% dari kebutuhan operasional Tangguh, apakah pembangunan Kilang 3 dimulai tahun 2016 atau tidak.**
- 2. Pengadaan dan grup Manajemen Rantai Pasokan di Tangguh harus mengidentifikasi produk dan jasa yang potensial yang memenuhi syarat untuk pengadaan non-kompetitif dan mengomunikasikan hasilnya secara luas sehingga bisnis Papua dapat berfokus untuk melayani kebutuhan ini.**
- 3. BP harus terus mendukung Jasa Pengembangan Bisnis (BDS) dalam upayanya untuk menciptakan tambahan bisnis yang dijalankan oleh IP di Bintuni dan kota-kota lain di wilayah ini, namun harus menekankan pelatihan dan pembimbingan untuk IP untuk menghindari ketergantungan jangka panjang pada BP**

## **VI. Tata kelola dan Transparansi Pendapatan**

Dukungan BP untuk perbaikan tata kelola lokal dan transparansi yang lebih luas sudah lama menjadi pusat pengembangan dan kesinambungan dari program sosial Tangguh dan untuk meningkatkan kemungkinan penggunaan secara produktif dan transparan atas pendapatan Tangguh. BP tidak dapat membuat program-program sosialnya efektif atau berkesinambungan tanpa suatu mitra pemerintah daerah yang transparan dan fungsional. Dan sudah jelas bahwa untuk mencapai sasaran ini memerlukan suatu komitmen berkelanjutan.

Setelah satu dekade memberikan dukungan untuk pembangunan kapasitas, telah banyak kemajuan yang dicapai, khususnya pada tingkat kabupaten. Untuk pertama kalinya, laporan keuangan Teluk Bintuni (untuk tahun 2014) dinilai “acceptable (dapat diterima)” oleh BPK. Ini bukanlah tingkat tertinggi dari “*unqualified*” (wajar tanpa pengecualian) yang harus terus didorong oleh BP, namun ini adalah suatu peningkatan besar dari audit tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat diaudit (nilai “*disclaimer*” (tidak memberikan pendapat)).<sup>83</sup> Laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit oleh pemerintah daerah akan terus maju yang memperlihatkan tingkat pendapatan dari Tangguh dan penggunaannya.

---

<sup>83</sup> Untuk penjelasan mengenai kategori audit BPK, lihat laporan TIAP November 2012 halaman 37-38.

Akan tetapi, pemerintah provinsi belum menunjukkan perbaikan yang sebanding. Sayangnya, laporan keuangan Papua Barat pada tahun 2014 terus mendapatkan nilai terendah oleh BPK dengan status *disclaimer*. Terdapat juga tuduhan-tuduhan korupsi dan hukuman yang serius yang melibatkan sebagian besar anggota DPRD.<sup>84</sup> Bahkan lebih penting sehubungan dengan Tangguh, DPRD telah gagal mengesahkan Perdasus DBH, peraturan daerah yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan alokasi sumber daya dari Otonomi Khusus. Ketentuan-ketentuan dari peraturan ini pada akhirnya akan mengalokasikan pendapatan Tangguh (dan proyek-proyek sumber daya lainnya) secara transparan di antara provinsi, kabupaten penghasil, dan kelompok adat yang memiliki klaim kepemilikan atas lahan. Ketentuan-ketentuan ini tampaknya telah disetujui oleh semua pihak terkait, akan tetapi sengketa politik di DPRD telah menunda pengesahan.<sup>85</sup> Sampai proses ini diselesaikan, tuntutan dari suku Sebyar di pesisir pantai utara untuk kompensasi adat untuk dibayarkan oleh BP akan berlanjut. BP telah melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung proses ini, pada saat ini, ia hanya bisa terus mendorong para pihak untuk mengesahkan peraturan tersebut.

Dengan akan diadakannya pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat untuk kabupaten dan provinsi, pemerintahan akan menghadapi ujian besar: transisi pertama kepada pemerintah baru sejak pendirian kedua yurisdiksi. BP tidak dapat mempengaruhi hasilnya. Namun BP dapat memberikan kepada Bupati baru dan Gubernur baru keyakinan bahwa ia akan terus mendukung pelatihan kapasitas dan pengembangan keterampilan bagi para pejabat baru mereka. Sejak UGM menarik diri sebagai mitra pemerintahan utama BP, BP telah bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk menjabarkan ruang lingkup dan ketentuan-ketentuan dari kontrak baru, namun BP belum menyelesaikan proses ini. Ini bukanlah waktunya bagi BP untuk mengurangi atau menunda dukungan pemerintahannya. Segera setelah Bupati baru bekerja, BP harus mulai bekerjasama dengan beliau untuk segera melaksanakan proses untuk memilih mitra pemerintah yang baru. Apabila manfaat yang diperoleh selama ini oleh Bupati sebelumnya akan diteruskan, BP harus meneruskan, tanpa interupsi, dukungannya terhadap kapasitas pemerintah daerah dan bagi organisasi masyarakat sipil di Teluk Bintuni.

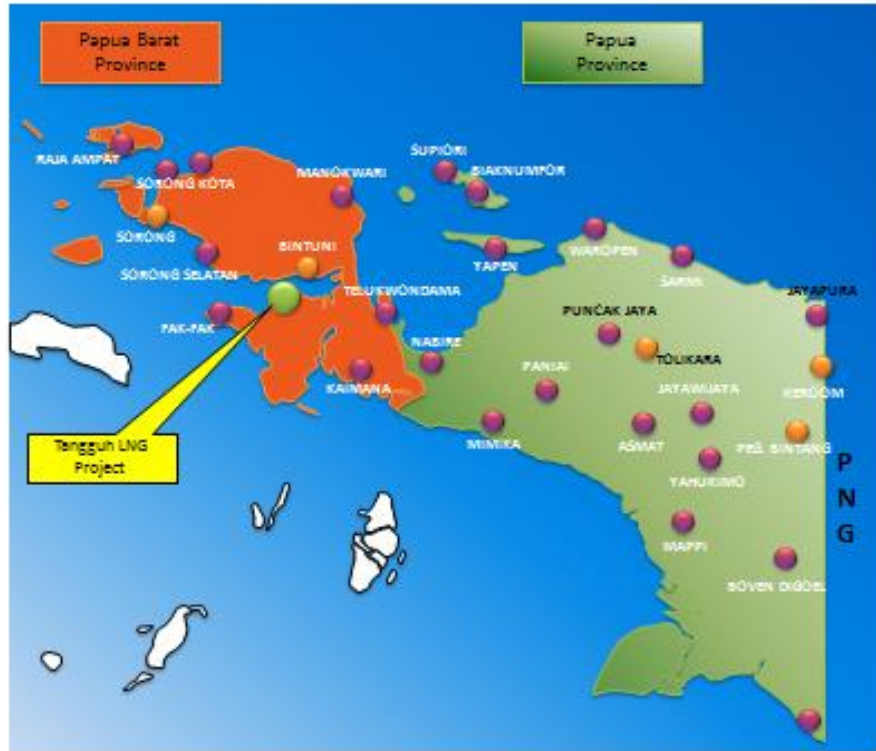
---

<sup>84</sup> Lihat, misalnya, "Replace All Members of Parliament in West Papua" Media Indonesia, 12 Feb. 2014.

<sup>85</sup> Detil tentang Perdasus DBH diuraikan dalam laporan TIAP Mei 2014 halaman 51.



**LAMPIRAN 1**  
**PETA PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**



**LAMPIRAN I1**  
**PEMANGKU KEPENTINGAN YANG BERKONSULTASI DENGAN TIAP**  
**KUNJUNGAN TAHUN 2015**

**Pejabat Pemerintah: Indonesia**

- Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
- IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Energi dan Sumber Daya Mineral
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Wakil Menteri Keuangan
- Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Sofyan Basir, Presiden Direktur PLN
- Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas
- Suripto, Deputi IV Intelijen Ekonomi, BIN
- Brigjen TNI. Liston Simanjuntak, Direktur Maluku & Papua, di bawah Deputi II Intelijen Nasional, BIN
- Brigjen TNI Daru Cahyono, Kepala BIN Papua Barat

**Pejabat Pemerintah: Papua dan Papua Barat**

- Brigjen TNI Tatang Sulaiman, Kasdam Cendrawasih, Papua
- Paulus Waterpau, Kapolda Papua
- Drs Imam Margono, Deputi Kepala Kepolisian Daerah, Papua Barat

*Anggota DPRD – Papua Barat*

- M. Sanuni R
- Leonard P
- Albert Kareth
- Xarerius K
- Ismael

- Ir. Ridwan Usman
- Febry J Andja
- Ortis F S
- Herdowina Isir
- Erik Manibuy
- Bram Goram
- Yonada Trogea
- Mauridi S
- Arifin S
- Saul Rante L

*Anggota MRP*

- Anike TH Sabami – Deputy 1 MRP
- TH Wolas Krenal
- Mesianus Waney
- Lusia H
- Antonia Bauw
- Olla Dorkas D
- Zeth M
- Aris Waropen
- Christian R
- Frengky S
- Charles Winowoda

**Pejabat Pemerintah: Amerika Serikat**

- Robert O. Blake, Duta besar AS untuk Indonesia
- Sara Litke, Sekretaris I, Energi dan Industri Ekstraktif, Kedutaan Besar Amerika Serikat
- John Hansen, Direktur, Kantor Lingkungan, Badan Pembangunan Internasional A.S, Kedutaan Besar Amerika Serikat

### **Pejabat Pemerintah: Inggris**

- Moazzam Malik, Duta Besar Inggris untuk Indonesia

### **Pejabat Pemerintah – Kabupaten Teluk Bintuni**

- Drg. Alfons Manibui, DESS – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni (Rapat ini diadakan di Jakarta)
- Dr. Andreas Ciokan – Kepala Dinas Kesehatan Teluk Bintuni
- Dr. Eka Suradji, Direktur, Rumah Sakit Bintuni
- Gustaf Manuputty – Asisten Satu Teluk Bintuni
- AKBP Harry Supriono - Kapolres, Bintuni
- Jamaludin Iribaram – Kepala Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni
- Jacomina Jane M.Fimbay,S.pd. – Kepala Departemen Pemberdayaan Perempuan Teluk Bintuni
- Drs. Yoseph Rony - Kepala Departemen Perhubungan, Informasi, dan Telekomunikasi Teluk Bintuni
- Simon Papa – Kepala Departemen Perdagangan, Industri, Koperasi dan Keuangan Mikro Teluk Bintuni

### **Pejabat Pemerintah – Kabupaten Fakfak**

- Mohammad Uswanas - Bupati, Fakfak
- Siti Rahma Hegemur, ST – Ketua DPRD Kabupaten Fakfak
- Ir Abraham Sopaheluwakan, M, Si – Asisten 2
- Ahmad Uswanas, S.Sos, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak (Bagian Umum)
- Ir. Chesty J Sahetapy, Kepala Dinas Lingkungan Daerah
- Arobi Hindom, Kepala Departemen Pertambangan Kabupaten Fakfak
- Drs. Benny Thie, Kepala Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak
- John Rawulu, Asisten Bupati
- Jufri Uswanas, ADC
- Taufiq, Sekretaris Bupati
- Chrisye Tala, Protokol

- Alimin Suli, Pengawal
- La Tasmin, Kepala Hubungan Masyarakat Kabupaten Fakfak
- Khamid, Pengawal

**Penduduk Wilayah Kepala Burung Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Babo**

- Agus Suharjo, Kepala Distrik, Babo
- Iptu Pol Robin Kumbarayuda – Perwakilan TNI Babo
- Kapten Inf Dali Mendrofa - Perwakilan Kapolda Babo

**Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)**

*LSM di Jayapura*

- Feri Marisan - ELSHAM Papua
- Fritz Ramandey - Komnas HAM Papua
- Benja Mambai – WWF Papua
- Decky Rumaropen – YPMD

*LSM di Jakarta*

- Abdon Nababan, AMAN-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
- Dino Prayoga, Pelestarian Alam
- Sapto H. Sakti, Pelestarian Alam
- Meliana Lumbantoruan, Publish What You Pay

*LSM di Manokwari*

- Yan Christian Warinusy – LP3BH
- Samuel Yansenem – LP3BH
- Andris Wapdaron – LP3BH

**Mitra Pelaksana**

*Universitas Indonesia – Tim Studi Survei Pendapatan*

- Prof. Dr. Dody Prayogo MPSt
- Sakti Wirayudha
- Yosef Hilarius
- Evelyn Suleman

- Chotib
- Sulastri

*Kemitraan – Tim Studi Pemerintahan*

- Erry Riyana Hardjapamekas
- Dr Agung Djojosoekarto
- Miftah
- Qisai

*PUPUK – Program Pembangunan Kewirausahaan Pribumi (IEDP)*

- Bastian Annas Saputra
- Bina Swadaya Konsultan  
Andi Rahman Kurniadi
- Nany Haryati

*Institut Teknologi Bandung – Perumahan Pesisir Pantai Utara*

- Prof Rizal Z Tamin

*Wakil UNCEN*

- Julius Ary Mollet – Deputi Rektor UNCEN

**Analisis Sektor Swasta**

- Douglas Ramage, Bower Asia Group
- Sidney Jones, Direktur, Institute for Policy Analysis of Conflict

**Lembaga Akademis di Papua dan Papua Barat**

- Ir. Onesimus Yoku, MS, Pejabat Rektor - UNIPA
- Y. S. Budiyanto, Wakil Rektor – UNIPA
- Linda Lindongi, Sekretaris – UNIPA

**Perorangan**

- Dr. Suriel S. Mofu
- Reverend Herman Saud
- Duta Besar Sabam Siagian
- Agus Sumule, UNIPA, Konsultan Independen

### LAMPIRAN III

#### RINGKASAN KEGIATAN RENCANA AKSI MASYARAKAT (“CAP”) DAN ANGGARAN UNTUK DAV (2004-2015)

DAV		2004	2005	2006	2007	2008	2009
		1	Weriagar	a. Peralatan Perikanan b. Pelatihan memasak dan menjahit WP c. Pelatihan mekanik motor tempel d. Bantuan pendidikan e. Renovasi masjid Catatan: Tahun pertama diterima Rp 250 juta karena pemisahan desa dengan Mogotira	a. Bantuan pendidikan b. Program sumur air bersih c. Mesin sagu WP d. Pelatihan menjahit WP e. Renovasi masjid	a. Peralatan perikanan b. Renovasi gang c. Pembangunan pemecah ombak d. Bantuan pendidikan e. Mesin sagu WP	a. Bantuan pendidikan b. Peralatan ikan kering WP c. Renovasi masjid d. Bantuan musik dan seni YP
2010	2011			2012	2013	2014	2015
a. Bantuan pendidikan b. Pemecah ombak c. Renovasi dan peralatan masjid dan gereja	a. Kesehatan (insentif untuk kader dan tambahan nutrisi b. Perluasan gang c. Bantuan			a. YP (peralatan olah raga, mesin pemotong rumput, instrumen musik) b. Kesehatan (peralatan	a. Dukungan transportasi (pengadaan perahu panjang) b. Bantuan pendidikan	a. Kesehatan (insentif untuk kader kesehatan dan dukungan untuk program posyandu)	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Perempuan (bantuan pos kesehatan)</li> <li>e. Program kebersihan (jamban)</li> <li>f. Renovasi rumah</li> <li>g. Listrik (gardu genset)</li> <li>h. Pembangunan gang</li> <li>i. Pemuda (peralatan olah raga dan musik)</li> <li>j. Program garis pantai</li> <li>k. Pelatihan ikan asin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pendidikan</li> <li>d. Renovasi masjid dan gereja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posyandu dan insentif bagi kader)</li> <li>c. Peralatan masjid dan gereja</li> <li>d. Insentif untuk komite</li> <li>e. Bantuan pendidikan</li> <li>f. Perluasan gang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kesehatan (tambahan makanan, dan insentif untuk kader)</li> <li>d. Alat tulis untuk pejabat desa</li> <li>e. Peralatan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Insentif untuk komite</li> <li>c. Mendukung kegiatan pejabat desa</li> </ul>	
--	--	---	---	---	---	--	--



No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Mogotira	a. Peralatan Perikanan b. Pelatihan manajemen ekonomi c. Pelatihan mekanik motor tempel d. Bantuan pendidikan e. Renovasi gereja Catatan: Tahun pertama diterima Rp 250 juta karena pemisahan desa dengan Weriagar	a. Program sumur air bersih b. Pembangunan gang c. Bantuan pendidikan d. Pembangunan pemecah ombak e. Pembangunan dermaga	a. Bantuan pendidikan b. Pembangunan pemecah ombak c. Pelatihan manajemen ekonomi d. Bantuan olah raga YP	a. Pembangunan persiapan lahan b. Bantuan pendidikan c. Renovasi gereja d. Peralatan ikan kering WP e. Bantuan musik dan seni YP	a. Bantuan pendidikan b. Pemuda (tempat berlindung & program komputer c. Listrik (gardu genset) d. Program perempuan (pos kesehatan & pelatihan memasak) e. Pemagaran pertanian f. Renovasi rumah g. Renovasi gang	a. Bantuan pendidikan b. Pemuda (tempat berlindung & program komputer c. Pelatihan tentang perikanan dan pertanian d. Komputer untuk kantor desa e. Renovasi rumah f. Renovasi gang
		a. Bantuan pendidikan b. Pemuda (program komputer dan peralatan olah raga) c. Perikanan (perahu panjang	a. Perluasan dan renovasi gang b. Peralatan perikanan (jaring ikan) c. Bantuan pendidikan d. Kesehatan (peralatan atau	a. Bantuan pendidikan b. YP (peralatan olah raga) c. Kebun sayuran d. Insentif untuk kader e. Perluasan gang	a. Bantuan pendidikan b. Alat tulis untuk pejabat desa c. Dukungan transportasi (penyediaan perahu panjang) d. Peralatan	a. Kesehatan (program posyandu dan insentif untuk kader kesehatan)	Laporan dan Evaluasi program-program sebelumnya masih sedang berjalan, akan diikuti oleh pembuatan proposal baru

	<p>dan peralatan jaring)</p> <p>d. Konstruksi balai desa</p> <p>e. Renovasi rumah</p> <p>f. Pelatihan pertanian</p> <p>g. Pembangunan gang</p> <p>h. Perempuan (bantuan pos kesehatan)</p>	<p>pusat kesehatan masyarakat)</p> <p>e. Pemuda (peralatan olah raga)</p> <p>f. Transportasi (penyediaan perahu panjang)</p>		perikanan		
--	--	--	--	-----------	--	--

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		a. Peralatan perikanan b. Renovasi masjid c. Bantuan pendidikan d. Pelatihan mekanik motor tempel Catatan: Tahun pertama diterima Rp 250 juta karena pemisahan desa dengan Ekam	a. Program sumur air bersih b. Peralatan menjahit WP c. Pembangunan jembatan d. Konstruksi balai desa e. Mesin sagu WP	a. Renovasi perumahan b. Bantuan pendidikan c. Pelatihan memasak WP d. Mesin sagu WP	a. Renovasi perumahan b. Bantuan pendidikan	a. Bantuan pendidikan b. Renovasi dan peralatan masjid c. Bangunan kelas bermain d. Renovasi rumah e. Perempuan (pos kesehatan) f. Pemuda (peralatan tukang kayu, peralatan olah raga dan komputer) g. Mesin motor tempel 40 pk dan perahu panjang h. Renovasi gang	a. Bantuan pendidikan b. Pemuda (Komputer, kamera & mesin motor tempel) c. Perempuan (Balai pertemuan, pos kesehatan & mesin ketik) d. Perpustakaan e. Renovasi & peralatan masjid f. Program air bersih g. Renovasi rumah h. Renovasi gang
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Tomu	a. Bantuan pendidikan b. Pemuda (pembangunan balai dan pelatihan mesin)	a. Pemuda (motor tempel 5 pk) b. Bantuan pendidikan c. Renovasi dan peralatan masjid	a. Renovasi gedung kantor desa b. Peralatan perikanan c. Bantuan	a. Renovasi masjid b. Bantuan pendidikan c. Dukungan transportasi (badan perahu)	a. Evaluasi program CAP b. Kesehatan (tambahan makanan, dan insentif untuk	

		c. Pelatihan pertanian dan perikanan d. Renovasi balai desa e. Renovasi dan peralatan masjid f. Pembersihan sungai g. Renovasi rumah	d. WP (bantuan finansial untuk PKK) e. Renovasi rumah f. Motor tempel g. Insentif untuk komite h. Renovasi kantor komite	pendidikan d. Alat tulis dan insentif untuk komite	d. Renovasi jembatan	kader)	
--	--	--	--	---	----------------------	--------	--

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		4	Ekam	a. Peralatan perikanan b. Renovasi masjid c. Bantuan pendidikan d. Pelatihan mekanik motor tempel Catatan: Tahun pertama diterima Rp 250 juta karena pemisahan desa dengan Tomu	a. Renovasi perumahan b. Program sumur air bersih c. Konstruksi balai desa d. Pelatihan menjahit WP e. Pembangunan jembatan	a. Renovasi perumahan b. Bantuan pendidikan c. Pelatihan memasak WP	a. Renovasi perumahan b. Pembangunan posyandu c. Mesin motor tempel d. Bantuan pendidikan e. Bantuan olah raga YP

					f. Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga g. Mesin motor tempel 40PK & perahu panjang	f. Renovasi rumah g. Penerangan publik
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	a. Bantuan pendidikan b. Perempuan (bantuan pos kesehatan) c. Pemuda (peralatan olah raga, komputer, dan genset) d. Mesin motor tempel e. Perkebunan dan bibit unggas d. Perahu panjang dan jaring ikan	a. Bantuan pendidikan b. Pemuda (penyediaan motor tempel 15 PK c. Perikanan (penyediaan perahu 5,5 HP) d. Renovasi masjid e. Insentif dan alat tulis untuk komite	a. Bantuan pendidikan b. WP (penyediaan ternak) c. Peralatan pertanian d. YP (peralatan olah raga) e. Peralatan perikanan f. Alat tulis dan insentif untuk komite	a. Renovasi masjid dan gereja b. Bantuan pendidikan c. Peralatan perikanan d. Renovasi rumah e. Alat tulis dan insentif untuk komite	a. Peralatan untuk komite b. Renovasi masjid dan mendukung kegiatan pemimpin gereja c. Bantuan pendidikan d. Evaluasi program CAP	

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		5	Taroy	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dermaga</li> <li>b. Pembangunan gang</li> <li>c. Program sumur air bersih</li> <li>d. Bantuan pendidikan</li> <li>e. Pelatihan memasak WP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi masjid</li> <li>b. Bantuan pendidikan</li> <li>c. Pelatihan menjahit WP</li> <li>d. Konstruksi balai desa</li> <li>e. Pembangunan dermaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi masjid</li> <li>b. Renovasi perumahan</li> <li>c. Peralatan ikan kering WP</li> <li>d. Bantuan pendidikan</li> <li>e. Bantuan olah raga YP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi masjid</li> <li>b. Renovasi perumahan</li> <li>c. Bantuan pendidikan</li> <li>d. Bantuan pertanian WP</li> </ul>
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan pendidikan</li> <li>b. Pemuda (komputer dan gergaji mesin)</li> <li>c. Renovasi masjid</li> <li>d. Gang 250 m</li> <li>e. Balai desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi gang</li> <li>b. Renovasi masjid</li> <li>c. Kesehatan (program ibu, anak dan darurat)</li> <li>d. Bantuan pendidikan</li> <li>e. Insentif dan alat tulis untuk komite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan pendidikan</li> <li>b. Renovasi rumah perlindungan</li> <li>c. Renovasi rumah</li> <li>d. Bantuan untuk darurat kesehatan</li> <li>e. Insentif untuk komite</li> <li>f. Perluasan gang</li> <li>g. Alat tulis untuk pejabat desa</li> <li>h. Renovasi toilet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi perumahan</li> <li>b. Bantuan transportasi untuk keadaan darurat</li> <li>c. WP (penyediaan bibit sayuran)</li> <li>d. Kesehatan (Bantuan untuk Posyandu)</li> </ul>		

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		6	<b>Sebyar Rejosari (Desa Yang Secara Tidak Langsung Terkena Dampak/ IDAV)</b>	a. Bantuan pendidikan b. Perikanan (perahu dan peralatan jaring) c. Penyediaan bibit pertanian & pelatihan d. Pelatihan Mekanik	a. Bantuan pendidikan b. Perikanan (perahu dan peralatan jaring) c. Renovasi masjid dan gereja d. Peralatan sekolah	a. Bantuan pendidikan b. Pembangunan dermaga c. Perempuan (peralatan & pelatihan menjahit) d. Pemuda (peralatan olah raga)	a. Bantuan pendidikan b. Perempuan (pelatihan membuat kue sagu & menjahit) c. Bantuan infrastruktur keagamaan d. Bantuan infrastruktur sekolah
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		a. Bantuan pendidikan b. Perempuan (pelatihan membuat kue sagu) c. Renovasi rumah d. Bantuan infrastruktur keagamaan e. Kebersihan (jamban)	a. Program perempuan (pelatihan menjahit) b. Bantuan untuk merayakan hari Kartini c. Insentif untuk komite	a. Bantuan pendidikan b. Tambahan makanan c. Renovasi dermaga d. Penyediaan perahu dan mesin motor tempel 40 PK e. YP (peralatan olah raga) f. Renovasi masjid	a. Bantuan pendidikan b. Alat tulis untuk pejabat desa c. Bantuan transportasi (penyediaan perahu panjang) d. YP (instumen dan peralatan musik) e. WP (pelatihan memasak)	a. Bantuan pendidikan b. Kesehatan (bantuan program posyandu dan insentif untuk kader) c. WP (bantuan hari Kartini, program kehidupan perempuan, pelatihan memasak)	a. Laptop dan printer untuk pejabat desa

	f. Mesin pemotong rumput		dan gereja g. Peralatan air bersih h. penyediaan mesin pemotong rumput i. Insentif dan alat tulis untuk komite		d. YP (peralatan olah raga) e. Peralatan untuk pejabat desa f. Renovasi rumah	
--	--------------------------	--	---	--	---	--

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		7	Tofoi	a. Pembangunan kios b. Program sumur air bersih c. Pelatihan manajemen ekonomi	a. Pembangunan dermaga b. Pembangunan puskesmas c. Bantuan keuangan mikro d. Program sumur air bersih e. Pelatihan menjahit WP	a. Bantuan pendidikan b. Pelatihan menjahit dan memasak WP c. Pelatihan manajemen ekonomi d. Program sumur air bersih e. Pembangunan puskesmas	



2010	2011	2012	2013	2014	2015
a. Bantuan pendidikan b. Pelatihan batu bata merah c. Perikanan (mesin dan perahu panjang) d. Traktor dan mesin pemotong rumput e. Pemuda (peralatan olah raga dan pelatihan tukang kayu dan komputer) f. Perempuan (balai dan pelatihan memasak)	a. Perikanan (peralatan perikanan) b. Kesehatan (kegiatan kesehatan ibu, dan penghargaan untuk kader perempuan) c. Program perempuan (mesin sagu) d. Bantuan pendidikan	a. Kesehatan (program nutrisi kesehatan untuk ibu hamil) b. Bantuan pendidikan c. Insentif dan alat tulis untuk komite d. Renovasi masjid dan gereja e. Bantuan finansial usaha untuk kelompok perempuan setempat f. Renovasi balai desa	a. Renovasi balai desa b. Kesehatan (tambahan makanan, dan insentif untuk kader)	a. Kesehatan (renovasi posyandu) b. Bantuan pendidikan c. Insentif untuk komite d. Renovasi balai desa e. Renovasi gereja	

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		8	Irarutu III (Desa yang Secara Tidak Langsung Terkena Dampak/ IDAV)	a. Program sumur air bersih		a. Bantuan pendidikan b. Pembangunan jembatan c. Bantuan pos kesehatan	a. Bantuan pendidikan b. Perempuan (pelatihan memasak & menjahit) c. Bantuan keagamaan d. Bantuan seni budaya e. Pemuda (peralatan olah raga & musik) f. Pengembangan pasar
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		a. Bantuan pendidikan b. Perempuan (Perikanan, Perkebunan & pelatihan Manajemen) c. Bantuan infrastruktur keagamaan e. Pembangunan	a. Perikanan (peralatan untuk penangkapan kepiting) b. Kesehatan (tambahan makanan, dan insentif untuk kader kesehatan) c. Bantuan pendidikan	a. Bantuan pendidikan b. Renovasi masjid dan gereja c. Kesehatan (tambahan makanan, dan insentif untuk kader) d. Insentif dan alat tulis untuk komite	a. Peralatan perikanan b. Bantuan pendidikan c. YP (peralatan olah raga, dan komputer) d. Mesin pemotong rumput	a. YP (peralatan olah raga, komputer, mesin pemotong rumput) b. Peralatan perikanan c. Operasional komite CAP	

		pusat bisnis	d. Insentif untuk komite	e. Peralatan perikanan f. Bantuan finansial untuk koperasi			
--	--	--------------	--------------------------	---	--	--	--

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		Komitmen LARAP yang dilaksanakan tahun 2004 - 2009					
9	Tanah Merah Baru	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		a. Bantuan pendidikan b. Peralatan & pelatihan perikanan & pertanian Perempuan (pelatihan memasak) d. Pemuda (pelatihan komputer & bahasa Inggris, program	a. Perikanan (penyediaan lemari es dan bahan bakar) b. Kesehatan (tambahan makanan, insentif untuk kader, peralatan untuk Posyandu) c. Program perempuan	a. Peralatan perikanan b. Peralatan pertanian c. YP (instumen dan peralatan musik) d. Kesehatan (tambahan makanan, insentif untuk kader, peralatan untuk	a. Bantuan pendidikan b. Peralatan pertanian dan bibit c. Peralatan perikanan d. YP (bantuan penyediaan pakaian)	a. Kesehatan (bantuan program posyandu dan insentif untuk kader) b. Renovasi balai desa c. Insentif untuk komite d. Bantuan pendidikan e. Penyediaan	a. Bantuan pendidikan b. Kesehatan (Bantuan untuk program Posyandu)

	kebudayaan) e. Bantuan keagamaan	(pelatihan memasak) d. Bantuan pendidikan e. Insentif dan alat tulis untuk komite f. Alat tulis untuk pejabat setempat	Posyandu) e. Bantuan pendidikan f. Renovasi masjid dan gereja g. Bantuan transportasi h. WP (Pelatihan memasak dan menjahit) I. Alat tulis dan insentif untuk komite		mesin pemotong rumput f. Evaluasi CAP	
--	-------------------------------------	---	---	--	--	--

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		Komitmen LARAP yang dilaksanakan tahun 2004 - 2009					
10	Saengga	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		a. Bantuan pendidikan b. Bantuan kebudayaan c. Peralatan & pelatihan perikanan & pertanian	a. Renovasi gereja b. Kesehatan (pemberdayaan kader kesehatan) c. Alat tulis untuk pejabat setempat d. Peralatan perikanan		a. Renovasi gereja b. Insentif untuk komite	a. Renovasi gereja b. Bantuan pendidikan c. Kesehatan (bantuan program posyandu dan insentif untuk kader)	a. Peralatan air bersih b. YP (peralatan olah raga, dukungan bagi program retreat pemuda) c. Bantuan

	d. Genset untuk kantor desa e. Perempuan (pelatihan memasak) f. Bantuan gereja g. Pemuda (peralatan olah raga & pelatihan mesin)	e. YP (olah raga) f. Bantuan pendidikan g. Insentif, alat tulis dan komputer untuk komite			d. Program air bersih e. Dukungan untuk komite CAP operasional f. Peralatan pertanian	pendidikan
--	---	---	--	--	---	------------

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		Komitmen LARAP yang dilaksanakan tahun 2004 - 2009					
11	Onar	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		a. Bantuan pendidikan b. Bibit pertanian dan peternakan, peralatan &	a. Kesehatan (tambahan makanan, insentif untuk kader, transportasi untuk	a. Kesehatan (tambahan makanan, dan insentif untuk kader)	a. Bantuan pendidikan b. Peralatan perikanan c. Renovasi gereja	a. Bantuan pendidikan b. Transportasi (mesin motor tempel)	a. Bantuan finansial untuk usaha perempuan b. Peralatan pertanian

	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelatihan</li> <li>c. Pemuda (peralatan olah raga dan musik)</li> <li>g. Perempuan (pelatihan memasak &amp; menjahit)</li> <li>e. Mesin pemotong rumput</li> <li>f. Pelatihan genset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>keadaan darurat)</li> <li>b. Bantuan pendidikan</li> <li>c. YP (olah raga, musik, bahan bakar untuk listrik)</li> <li>d. WP (pelatihan memasak)</li> <li>e. Alat tulis untuk komite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bantuan pendidikan</li> <li>c. Renovasi jembatan</li> <li>d. Bantuan bahan bakar untuk listrik (genset)</li> <li>e. Alat tulis dan insentif untuk komite</li> <li>f. WP (pelatihan memasak)</li> <li>g. YP (peralatan olah raga)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kesehatan (tambahan makanan)</li> <li>e. Insentif dan alat tulis untuk komite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kesehatan (bantuan program posyandu dan insentif untuk kader)</li> <li>d. Dukungan untuk komite operasional CAP</li> <li>e. Peralatan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Transportasi (penyediaan perahu panjang)</li> <li>d. Penyediaan peralatan pertanian</li> </ul>
--	--	---	---	--	--	--

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi masjid</li> <li>b. Renovasi sekolah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi masjid</li> <li>b. Bantuan pendidikan</li> <li>c. Program genset/listrik</li> <li>d. Pelatihan memasak WP</li> <li>e. Pembangunan balai perempuan WP</li> <li>f. Pembangunan dermaga</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi dermaga</li> <li>b. Perempuan (pembangunan balai perempuan dan pos kesehatan, pelatihan tentang ikan asin, keripik dan perkebunan)</li> <li>c. Renovasi masjid</li> <li>d. Listrik (genset)</li> <li>e. Program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan pendidikan</li> <li>b. Listrik (genset)</li> <li>c. Perempuan (pelatihan memasak)</li> </ul>



					perikanan f. Pemuda (komputer, peralatan olah raga dan gergaji mesin)	
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	a. Bantuan pendidikan b. Peralatan pos kesehatan c. Perikanan (perahu panjang dan jaring) d. Perempuan (peralatan & pelatihan menjahit) e. Pelatihan perkebunan f. Pemuda (peralatan olah raga) g. Mesin pemotong rumput h. Peralatan masjid	a. Bantuan pendidikan b. Buku iqra untuk murid sekolah c. Renovasi dan peralatan masjid d. Insentif untuk guru Al'quran	a. Kesehatan (renovasi toilet) b. Bantuan pendidikan c. Penyediaan peralatan perikanan d. Penerangan publik e. Pemeliharaan genset	a. Bantuan pendidikan b. Penerangan publik c. Renovasi gang d. Kesehatan (tambahan makanan, dan insentif untuk kader) e. Renovasi masjid	a. WP (penyediaan perahu untuk mendukung kehidupan bagi perempuan) b. Bantuan untuk komite operasional CAP c. Pembangunan toilet rumah tangga d. Bantuan pendidikan e. Peralatan program air bersih	a. Transportasi (pengadaan perahu panjang) b. Penyediaan peralatan perikanan c. Pemeliharaan genset d. Bantuan pendidikan e. Pembangunan gang f. Renovasi dermaga

No	DAV	2004	2005	2006	2007	2008	2009
					a. Pelatihan memasak dan menjahit b. Bantuan pendidikan	a. Bantuan pendidikan	a. Bantuan pendidikan b. Perempuan (pelatihan memasak & berkebun) c. Pemuda (peralatan olah raga dan gergaji mesin)
13	Tomage (mendapatkan bagian dari Otoweri)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				a. Renovasi gereja b. Penyediaan bibit sayuran c. Peralatan perikanan d. Bantuan pendidikan	a. Renovasi gereja b. Bantuan pendidikan c. Peralatan perikanan d. Penyediaan bibit sayuran e. Kesehatan (tambahan makanan)	a. Renovasi gereja b. Kesehatan (program posyandu dan insentif untuk kader) c. Perikanan (penyediaan perahu panjang) d. Peralatan pertanian e. Peralatan koperasi f. YP (peralatan olah raga)	

**LAMPIRAN IV**  
**SUMBER PENDAPATAN PAPUA BARAT DAN TELUK BINTUNI**

Daftar B: Komposisi pendapatan untuk provinsi Papua Barat dan kabupaten Teluk Bintuni

**Exhibit B. Revenue composition for Papua Barat province and Teluk Bintuni regency**

**Papua Barat province (Rupiah)**

Year	Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
	Tax revenue funds	Natural resource revenue funds*	General allocation funds	Special allocation fund	Special autonomy funds	Adjustment funds	
2012	194,849,441,366	1,037,491,013,463	901,398,453,000	38,633,110,000	2,071,458,058,000	110,859,130,000	4,354,689,205,829
2013	228,987,539,922	879,859,337,698	1,064,872,637,000	64,931,200,000	2,295,407,163,000	114,799,820,000	4,648,857,697,620
2014	177,869,455,284	1,425,049,228,966	1,122,264,659,000	51,215,730,000	2,547,315,954,000	125,403,301,000	5,449,118,328,250

\*This is for all natural resources revenue and includes  
Tanggung

**Teluk Bintuni regency (Rupiah)**

Year	Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Total
	Tax revenue funds	Natural resource revenue funds*	General allocation funds	Special allocation fund	Special autonomy funds	Adjustment funds	
2012	156,133,226,547	78,804,428,748	472,543,967,000	43,298,340,000		3,882,682,000	754,662,644,295
2013	213,567,759,924	151,912,641,787	550,845,412,000	84,695,770,000		4,323,516,000	853,432,457,924
2014	196,473,126,675	246,121,049,487	576,627,839,000	66,232,160,000		19,375,247,000	1,104,829,422,162